BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
22. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Nomor 686);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Perencanaan Perangkat Daerah adalah suatu proses yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) yang dihimpun oleh satu atau lebih sub kegiatan.
20. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dengan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*).
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/ kegiatan/program/sasaran Perangkat Daerah sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya Perangkat Daerah agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan terima hasil pekerjaan.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat alokasi dan rincian belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

(1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi setiap unit kerja dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

(3) Indikator Kinerja dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

(4) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

(2) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

(3) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

Pasal 4

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan dilakukan perubahan jika terjadi perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Sumbawa merupakan sub sistem dari sistem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

Memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Selain itu, keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dengan keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pelaksanaan program dan rencana kerja (rencana kegiatan) dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026). Dengan demikian Rencana Strategis ini akan menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan urusan

wajib bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dibidang perhubungan di Kabupaten Sumbawa.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021-2026.
3. Sebagai dokumen pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendali pelaksanaan anggran tahunan.
4. Menyajikan ukuran kinerja yang harus dicapai sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan Kabuupaten Sumbawa

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi yang diselenggarakan adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungana Kabupaten Sumbawa, sebagai pengganti peraturan Bupati Sumbawa Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Struktur Organisasi

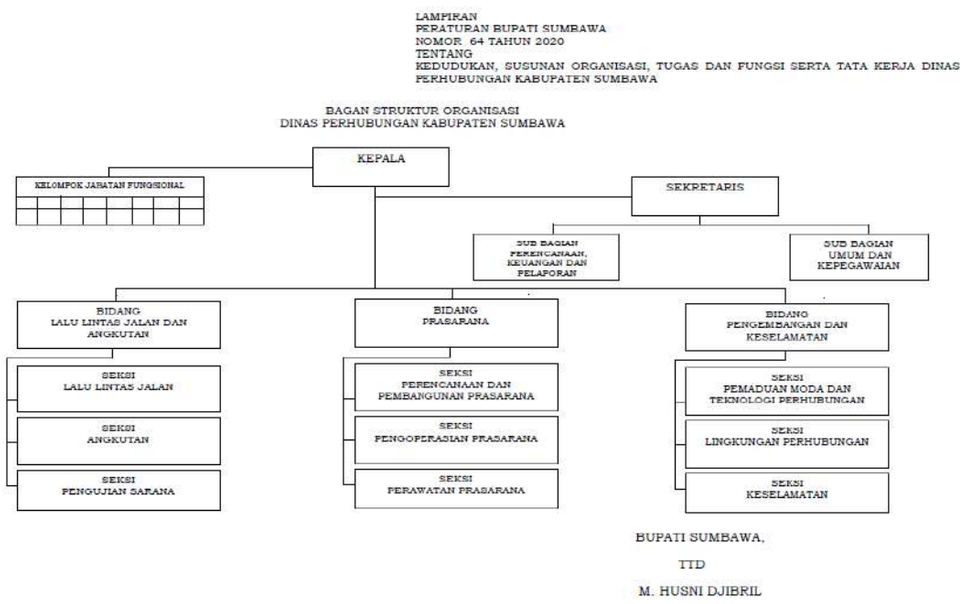

Rincian Tugas dan Fungsi

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala	a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; b. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

		Daerah	di bidang perhubungan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina transportasi	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Prasarana	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;

			b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikan kondisi tahun 2021 disajikan pada tabel data berikut ini :

a. Data SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Pegawai Struktural (org)	Pegawai Fungsional (org)	Staf (orang)	Jumlah
1	I/a	-	-	-	-
	b	-	-	-	-
	c	-	-	-	-
	d	-	-	-	-
2	II/a	-	-	-	-
	B	-	-	1	1
	C	-	-	3	3
	D	-	-	9	9
3	III/a	-	-	4	4
	b	1	-	4	5
	C	1	1	2	4
	D	12	-	1	13
4	IV/a	1	-	-	1
	B	1	-	-	1
	C	1	-	-	1
	Jumlah	17	1	24	42

b. Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Struktural (org)	Pegawai Fungsional (org)	Staf (org)	Jumlah (org)
1	S1	11	-	6	17
2	S2	2	-	-	2
3	D3	-	1	5	5
4	D1	-	-	-	-
5	SLTA	3	1	13	17
6	SLTP	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-
		16	2	24	42

Dari tabel data tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas cukup memadai di bidangnya. Disamping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan lainnya dimanfaatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 84 orang.

Berdasarkan jumlah SDM yang ada, terkait dengan pelasanaan tugas yang memerlukan keahlian spesifik di bidang perhubungan, beberapa pegawai Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal, diantaranya pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

2.2.2 Aset/Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa telah melakukan pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa s.d.Tahun 2021, sebagai berikut:

(1) Asset Tanah
(2) Asset Mesin dan Peralatan
(3) Asset Gedung dan Bangunan
(4) Asset Jalan, Irigasi dan Jaringan
(5) Asset Tetap Lainnya
(6) Asset Konstruksi dalam Pengerjaan
(7) Asset Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga-daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000001	3.037,00	2012	Terminal Bugis	Hak Pakai	11/12/1993	20	Terminal	Pembelian	835.175,00	Tanah Terminal Bugis
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000002	1.650,00	2012	Labuhan Badas	Hak Pakai	11/12/1993	14	Terminal	Pembelian	483.450,00	Tanah Terminal Labuhan Badas
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000003	10.000,00	2012	Tanah Terminal Utan	Hak Pakai	11/13/2003	09	Terminal	Pembelian	360.000,00	Tanah Terminal Utan
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000005	3.566,00	1994	Brang Bara	Hak Pakai	11/12/1993	34	Terminal	Pembelian	394.350,00	Tanah Terminal Brang Bara
5	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000006	3.174,00	1994	Empang	Hak Pakai	3/31/1994	04	Terminal	Pembelian	399.924,00	Tanah Bangunan Terminal Empang
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	105.870,00	1995	Jl. Garuda KM. 6 Kecamatan Labuhan Badas	Hak Pakai	5/4/1995	7	Gedung Kantor	Pembelian	338.000,00	Tanah eks BB Uma Gedong Karang Dima
Jumlah Harga												**2.810.899,00**	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz,M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	02.01.01.05.003	Dump Truck	000001	Mitsubishi Truck		Fiber & Besi	2010		MHMFE74F5AK029765	4D34T-F41685	EA 9091 AA	H-03394167	RB	Pembelian	411.400,00	Truk Angkutan Perintis Diperuntukkan Untuk Kecamatan
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	Toyota / Kijang		Besi	1996						RB	Pembelian	43.940,00	Barang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya
3	02.02.01.01.003	Station Wagon	000002	Isuzu / Phanter		Besi	2003		MHCTBR54 F3 249057	E.249057	EA 1132 AA	5578988	RB	Pembelian	180.000,00	Ex Dinas Perhubungan
4	02.02.01.01.003	Station Wagon	000003	Daihatsu Great New Xenia / X MT 1,3 STD VIN 2018		Fiber	2019		MHKVSEA1JKK051624	1NRG002560	EA 1232 AA			Pembelian	198.091,25	Mutasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 024/199.a/Umum-Setda 2019 Mutasi Dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 024/199.a/Umum-Setda/2019 Tanggal BAST : 16 Mei 2019. Mobil Operasional Kepala Dinas Perhubungan
5	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000001	Cerry / KF		Besi	1994						RB	Pembelian	42.000,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
6	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000002	Isuzu / TBR541 M	2499	Besi, Fiber, Plastik	2016		MHCTBR54F6K281149	E281149	EA 41 A	E.1510968.0		Pembelian	90.000,00	Barang berada di UPT PKB
7	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000003	ISUZU NEW PANTHER TBR 541 LM			2006		MHCTBR54F6K281135	E281135	EA 33 AA			Pembelian	180.000,00	
8	02.02.01.03.002	Pick Up	000001	Toyota / Kijang Pick		Besi	2001		MHF31KF60100112137	7K-0431918	EA 9105 AA	C.7561820	RB	Pembelian	80.000,00	Ex Dinas Perhubungan
9	02.02.01.03.002	Pick Up	000002	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 037502	4M4OUAB5436	EA 9096 AA	F-8831941	RB	Pembelian	276.848,00	Kendaraan perintis untuk Kecamatan Tarano

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
10	02.02.01.03.002	Pick Up	000003	Isuzu Panther /	2835	Besi	2009		MMBENK B70 9D 038746	UAB 5436	EA 9101 AA	F.8831945.0	RB	Pembelian	276.848,00	Kendaraan Perintis untuk Kecamatan Alas
11	02.02.01.03.002	Pick Up	000004	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 038641	UAB 5468	EA 9099 AA	F-8831944	RB	Pembelian	276.848,00	Kendaraan perintis untuk Kecamatan Orong Telu
12	02.02.01.03.002	Pick Up	000006	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 038723	UAB 5673	EA 9095 AA	F-8831940	RB	Pembelian	276.848,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan Batu Lanteh
13	02.02.01.03.002	Pick Up	000007	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 036974	UAB 5392	EA 9097 AA	F-8831942	RB	Pembelian	276.848,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan Batu Lanteh
14	02.02.01.03.002	Pick Up	000008	Mitsubishi Strada		Fiber & Besi	2010		MMBENKB70AD023 213	4M4OUAB8480	EA 9092 AA	H-03394168	RB	Pembelian	369.875,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
15	02.02.01.03.002	Pick Up	000010	Isuzu Panther		Besi	2011		MHCTBR54BBK158 950	E158950	DR 1129 XX			Pembelian	148.000,00	Angkutan Darat Bermotor Roda 4
16	02.02.01.03.002	Pick Up	000011	Isuzu		Besi	2011		MPATFS85HBT1073 15	JE7170	DR 9010 KX		RB	Pembelian	305.750,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
17	02.02.01.03.002	Pick Up	000012	Isuzu		Besi	2011		MPATFS85HBT1073 16	JE7171	DR 1043 AX		RB	Pembelian	305.750,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
18	02.02.01.03.002	Pick Up	000013	Isuzu		Besi	2011		MPATFS85HBT1073 17	JE7166	DR 1216 XX		RB	Pembelian	305.750,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
19	02.02.01.03.002	Pick Up	000014	Isuzu / NKR71HD E2-	4570	Besi	2012		MHCNK71LYCJ0405 32	B040532	EA 8661 A	J-04243314		Pembelian	1.342.442,20	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
20	02.02.01.03.002	Pick Up	000015	Hilux		Metal	2008		MR0AW126980012 468	ITR FE	EA 8070 AA			Pembelian	139.380,00	Mutasi Dari DPPK Dan Barang Berada Di Operasional Darat
21	02.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	000001	Kawasaki / LX150F	150		2017		MH4LX150FHJP528 60	LX150CEW73019	EA 4672 AA			Pembelian	39.528,00	
22	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000001 s/d 000004	Suzuki / A.100		Besi	1980						RB	Pembelian	8.800,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
23	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005	Yamaha / L2		Besi	1980						RB	Pembelian	550,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	Honda / Win / NF 100		Besi	1993						RB	Pembelian	6.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
25	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Honda / Win		Besi	1994						RB	Pembelian	3.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
26	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	Yamaha / YT	115	Besi	1998						RB	Pembelian	3.250,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
27	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	Yamaha / YT	115	Besi	1998						RB	Pembelian	3.200,00	Di Kantor Kecamatan Ropang
28	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000012	Honda / Bebek		Besi	2001						RB	Pembelian	3.800,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
29	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000013	Honda/Win / NF 100		Besi	2003		MH1HABD163K002 2403	ABDE-10021	EA 3210 AA	C73035330	RB	Pembelian	8.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
30	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	Honda/Win / NF 100		Besi	2003						RB	Pembelian	8.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
31	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000015	Honda Supra X 125 D	125 CC	Besi	2010		MH1JB8110AK5016 19	JB81E-1496972	EA 4000 A	H-00880501		Pembelian	14.000,00	Droping Dari DPKA Ke Dishubkominfo
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000016	Honda / NF 125 TD	125 CC	Besi	2012		MHIJB8116CK7859 86	JB81E-1780779	EA 4176 AA			Pembelian	14.662,50	Droping Dari Bagian Aset Setda Kab. Sumbawa
33	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000017	Suzuki EN 125 A		Fiber	2006		MH8EN125A9J-606574	F.405-ID-606632	EA 3843 AA			Pembelian	15.232,00	Mutasi Dari Kepala Desa Boal Kecamatan Empang
34	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000001	Kapal Angkutan Perintis GT		Besi & Kayu	2009						RB	Pembelian	150.675,00	Kapal Angkutan Perintis
35	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000002	Kapal Angkutan Perintis GT 12 6		Besi & Kayu	2009						RB	Pembelian	122.000,00	Kapal Angkutan Perintis
36	02.03.01.01.002	Mesin Frais	000001	LPE 320		Besi	2007							Pembelian	750,00	Ex Dinas Perhubungan
37	02.03.01.03.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	000001	-			2007							Pembelian	3.000,00	Ex Dinas Perhubungan
38	02.03.01.03.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	000002 s/d 000011	-		Besi	2010							Pembelian	1.650,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
39	02.03.01.09.012	Trafo Stater	000001	-		Fiber	2009							Pembelian	1.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
40	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	000001 s/d 000002	Takuba		Besi	2007							Pembelian	16.000,00	Ex Dinas Perhubungan
41	02.03.02.05.004	Kunci Pipa	000001 s/d 000002	-		Fiber	2007							Pembelian	100,00	Ex Dinas Perhubungan
42	02.03.02.06.002	Kunci Khusus Alat Besar Darat	000001	-		Besi	2011							Pembelian	1.750,00	Slak Leter
43	02.03.02.08.013	Kunci Pas	000001 s/d 000003	-		Besi	2007							Pembelian	425,00	Ex Dinas Perhubungan
44	02.03.03.01.072	Global Positioning System	000002	Garmin		Fiber	2013							Pembelian	6.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
45	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	000001	Luica Desto		Besi	2007							Pembelian	18.000,00	Barang Berada Di UPT PKB

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
46	02.03.03.10.037	alat timbangan/biara lainnya (dst)	000001	-		Besi	2007							Pembelian	35.000,00	Ex Dinas Perhubungan
47	02.03.03.16.005	Smoke Tester	000001	Cosber		Besi	2020							Pembelian	157.278,00	Pengadaan Smoke Tester + Honor Pengadaan Barang Jasa
48	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000003 s/d 000004	-		Kayu	2004							Pembelian	640,00	Ex Dinas Perhubungan
49	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	000017	Brother		Besi	2003							Pembelian	784,00	Ex Dinas Perhubungan
50	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	000024	Brother / 11-13 Inci		Besi	2011							Pembelian	1.200,00	Di Pelabuhan Alas
51	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000001 s/d 000002	-		Kayu	2002							Pembelian	614,00	Ex Dinas Perhubungan
52	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000003 s/d 000006	-		Kayu	2004							Pembelian	1.120,00	Ex Dinas Perhubungan
53	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000005	Brother		Besi	2002							Pembelian	691,00	Ex Dinas Perhubungan
54	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000007 s/d 000013	Brother		Besi	2003							Pembelian	1.692,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)
55	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000023	Brother		Besi	2003							Pembelian	282,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)
56	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000027	Brother		besi	2007							Pembelian	1.150,00	Ex dinas perhubungan
57	02.05.01.04.007	Brandkas	000009	Nasional		Besi	2004							Pembelian	3.600,00	Ex Dinas Perhubungan
58	02.05.01.04.007	Brandkas	000010	Ichiban		Besi	2004							Pembelian	3.600,00	Ex Dinas Perhubungan
59	02.05.01.05.005	White Board	000002	-		Triplek	2004							Pembelian	160,00	Barang Berada Diruang Server Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa
60	02.05.01.05.005	White Board	000003	Mitsubishi		Triplek	2007							Pembelian	375,00	Ex Dinas Perhubungan
61	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	Fingerspot		Fiber	2013							Pembelian	4.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
62	02.05.01.05.039	Mesin Laminating	000001	LFT-320		Fiber	2006							Pembelian	1.498,00	Ex Dinas Perhubungan
63	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000001	G Lite Tripod / 70 ' x 70'	Besar	Kain Dan Besi	2015						EKSTRA	Pembelian	960,00	Barang Berada Di Kepegawaian
64	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001 s/d 000020	-		Besi	2011							Pembelian	7.800,00	Papan Nama Jalan
65	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000021	-		Besi dan Kaca	2016							Pembelian	1.134,00	Dishubkominfo Kab. Sumbawa
66	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000001	-		Aluminium Dan Kaca	2016						EKSTRA	Pembelian	1.000,00	Dishubkominfo Kab. Sumbawa

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
67	02.05.02.01.017	Meja Panjang	000002 s/d 000003	-		Kayu	2004							Pembelian	720,00	Ex Dinas Perhubungan
68	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000026 s/d 000055	Fortuner / FN Hitam		Besi	2012							Pembelian	7.980,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
69	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000056 s/d 000100	Napolly		Plastik	2014						EKSTRA	Pembelian	5.400,00	Barang berada di aula
70	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000101 s/d 000140	Chitose		Besi	2019						EKSTRA	Pembelian	19.000,00	Barang berada di aula Dinas Perhubungan
71	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000102 s/d 000107	Chitose		Besi	2019						EKSTRA	Pembelian	1.000,00	Barang berada di aula Dinas Perhubungan
72	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-		Besi & Kain	2002							Pembelian	1.229,00	Barang Berada Di Ruangan Sekretaris
73	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000007	-		Besi & Kain	2004							Pembelian	1.160,00	Barang Berada Di UPT PKB
74	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000008	-		Kain & Kayu	2007							Pembelian	3.500,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi
75	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000001	Canon			2003							Pembelian	2.632,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)
76	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000003	Isebel		Besi dan kain	2005							Pembelian	450,00	Ex Kantor informasi dan komunikasi
77	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000076	Olimpic		Besi	2008							Pembelian	325,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
78	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000027 s/d 000028	-		Serbuk Kayu	2007							Pembelian	700,00	Barang Berada Di Ruangan Server Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa
79	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000030 s/d 000032	-		Kayu	2007							Pembelian	1.710,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)
80	02.05.02.04.003	A.C. Window	000009	Nasional		Fiber	2003							Pembelian	1.334,75	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)
81	02.05.02.04.003	A.C. Window	000010	Uchida		Fiber	2004						RB	Pembelian	4.800,00	Ex Dinas Perhubungan
82	02.05.02.04.003	A.C. Window	000011	Panasonic		Fiber	2004						RB	Pembelian	1.659,00	Barang Berada Di Ruangan Keuangan
83	02.05.02.04.003	A.C. Window	000014	Uchida		Fiber	2007							Pembelian	3.500,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi
84	02.05.02.04.003	A.C. Window	000016	Sharp	1 PK	Fiber	2011							Pembelian	4.600,00	UPTD RPD
85	02.05.02.04.003	A.C. Window	000017	Sharp		Fiber	2014							Pembelian	4.800,00	Pengadaan Pengatur Suhu Ruangan

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
109	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000008 s/d 000009	Isable		Kain dan besi	2014							Pembelian	3.600,00	Pengadaan Kursi Kerja
110	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000106	Isebel		Kain	2007							Pembelian	600,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)
111	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000115 s/d 000118	Polaris		Kain & Besi	2013							Pembelian	1.200,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
112	02.05.03.07.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	-		Kayu	2001							Pembelian	1.805,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi
113	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000016	-		Kayu & Kaca	2011							Pembelian	1.997,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
114	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000017	Sucitra		Kayu & Kaca	2013							Pembelian	1.750,00	UPTD RPD
115	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000018 s/d 000020	-		Aluminium & Kaca	2013							Pembelian	10.350,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
116	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000024 s/d 000025	Emporium	Sedang	Besi Dan Kaca	2019							Pembelian	6.300,00	Barang Berada Di Ruangan Sarana dan Ruangan Keuangan
117	02.06.01.02.003	Camera Electronic	000002	Canon DSC H300 / DSC H300		Fiber	2016							Pembelian	5.900,00	Barang berada di Bidang Operasional Dishubkominfo
118	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000002	LG / 2000 ANSI		Fiber	2011							Pembelian	7.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
119	02.06.01.05.022	Rambu/Bak Ukur	000001 s/d 000004	-		Besi	2011							Pembelian	13.728,00	Pengadaan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan (RPPJ)
120	02.06.01.05.022	Rambu/Bak Ukur	000005 s/d 000102	-		Besi	2011							Pembelian	66.640,00	Rambu-rambu Lalu Lintas
121	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000011	Favorite		Plastik	2004							Pembelian	280,00	Barang Berada Di Ruangan Kepala Dinas

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
122	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000012	Panasonic		Plastik	2006							Pembelian	291,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi
123	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	000007 s/d 000010	Welerwel		Fiber	2013							Pembelian	14.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
124	02.06.02.01.010	Facsimile	000003	HP		Fiber	2011							Pembelian	1.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
125	02.06.02.03.005	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	000001	-			2013							Pembelian	180.559,50	UPTD RPD
126	02.06.03.03.001	Unit Pemancar VHF/FM Portable	000001	-	3000 W		2009							Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
127	02.06.03.03.004	peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	000001	-	1000 W		2008							Pembelian	95.001,50	Ex Dinas Perhubungan
128	02.06.03.10.006	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	000001	Winner Set		Fiber	2004							Pembelian	6.000,00	Barang Berada Di RPD Setda Kab. Sumbawa
129	02.07.02.01.003	Audio/Vidio Comunication	000001	Vitron		Fiber	2004							Pembelian	680,00	Barang Berada Di RPD Setda Kab. Sumbawa
130	02.08.01.08.063	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	000001	12 Canel			2009							Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
131	02.08.01.14.024	Rotator	000001 s/d 000010	-		Plastik	2011							Pembelian	1.200,00	Kasi Operasional & Pengamanan LLAJ
132	02.08.01.41.062	Distiling Apparatus	000002	LG / 14 Inci	Besar	Fiber	2015							Pembelian	5.000,00	Barang Berada Di UPT PKB
133	02.08.03.03.033	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	000001 s/d 000050	Halex 7/8			2010							Pembelian	4.900,00	Kabel Antena
134	02.08.03.04.025	Thermometer Badan	000001 s/d 000005	CEM		Fiber	2020							Pembelian	11.000,00	Barang Pengadaan Covid-19 dan barang berada di Kasubbag perencanaan keuangan dan pelaporan (3 buah), Kasi Lalu Lintas Jalan 1 buah) dan Bendahara pengeluaran (1 buah)
135	02.10.01.02.001	P.C Unit	000019 s/d 000020	ACER		Fiber	2011							Pembelian	10.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
136	02.10.01.02.001	P.C Unit	000049 s/d 000050	HP		Campura n	2017							Pembelian	13.000,00	
137	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Dell / 14 Inci	Besar	Fiber	2015							Pembelian	14.000,00	Barang Dipegang Oleh Kasubbag Program

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
138	02.10.01.02.002	Lap Top	000006 s/d 000007	Lenovo	17 inci	Fiber	2017							Pembelian	16.000,00	Barang diBagian Bidang sarana darat Dan Bagian Kepegawaian Dishub
139	02.10.01.02.002	Lap Top	000008	Dell	17 Inci	Fiber	2017							Pembelian	16.000,00	Barang berada di Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan
140	02.10.01.02.002	Lap Top	000010	Dell / 14 Inci	Sedang	Fiber	2017							Pembelian	17.150,00	Barang Berada Di Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Dinas Perhubungan
141	02.10.01.02.002	Lap Top	000011	Lenovo	17 Inci	Fiber	2019							Pembelian	10.000,00	Barang Berada Di PKB (Pengujian Sarana)
142	02.10.01.02.002	Lap Top	000012 s/d 000013	Lenovo	14 inci	Fiber	2020							Pembelian	18.000,00	Laptop untuk Bendahara Penerimaan dan untuk Forum LLAJ
143	02.10.01.02.003	Note Book	000005	ACER		Fiber	2011						RB	Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
144	02.10.01.02.003	Note Book	000006	ASUS		Fiber	2011						RB	Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
145	02.10.01.02.003	Note Book	000007	Toshiba		Fiber	2013						RB	Pembelian	6.750,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
145	02.10.01.02.003	Note Book	000008	Toshiba		Fiber	2013						RB	Pembelian	6.750,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
145	02.10.01.02.003	Note Book	000009 s/d 000011	Toshiba		Fiber	2013							Pembelian	21.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
146	02.10.01.02.003	Note Book	000014	Lenovo / 14 Inci	Sedang	Fiber	2015							Pembelian	5.000,00	Barang Berada Di Bendahara Barang
147	02.10.01.02.003	Note Book	000015	Lenovo / 14 Inci	Sedang	Fiber	2015						RB	Pembelian	5.000,00	Barang Dipegang Oleh Bendahara Penerimaan
148	02.10.01.02.003	Note Book	000016	Acer		Fiber	2011						RB	Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika

149	02.10.02.01.006	CPU (Peralatan Mainframe)	000002	LG	31 M ES 2	Fiber	2011							Pembelian	4.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
150	02.10.02.03.002	Monitor	000003 s/d 000006	LG		Fiber	2010							Pembelian	10.911,70	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
151	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000004	Canon Pixma IP 2770		Fiber	2013							Pembelian	3.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
152	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	Omnikey 5422		Fiber	2019							Pembelian	42.500,00	Barang Berada Di PKB (Pengujian Sarana)
153	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000019	HP / Deskjet 3920		Fiber	2006						RB	Pembelian	2.080,00	Barang Berada Di Ruangan Server Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa
154	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000034	Canon Pixma / MP 2778		Fiber	2012						RB	Pembelian	1.200,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
155	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000035 s/d 000038	Canon Pixma MP 237		Fiber	2013							Pembelian	3.900,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
155	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000037	Canon Pixma MP 237		Fiber	2013						RB	Pembelian	1.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
156	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000047 s/d 000048	Canon / IP 2770	Sedang	Fiber	2015						EKSTRA	Pembelian	1.500,00	Barang Berada Di Kepegawaian Dan Keuangan
157	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000049 s/d 000053	Canon / IP 2770		Fiber	2017							Pembelian	5.000,00	Barang berada di kepegawaian, keuangan, bidang sarana darat, bidang keselamatan dan bidang operasional Dishub
158	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000054	HP / 3 In 1		Fiber	2017							Pembelian	3.500,00	Barang berada di Bagian Keuangan
159	02.18.01.01.001	Traffic Light	000001	ASP SMP EL02		Fiber, Kaca & Besi	2007							Pembelian	22.755,00	Lampu Lalu Lintas Depan Dinas Peternakan Sumbawa
160	02.18.01.01.001	Traffic Light	000002	ASP SMP EL02		Fiber, Kaca & Besi	2007							Pembelian	22.755,00	Lampu Lalu Lintas Depan Dealer Honda NSS Sumbwa
161	02.18.01.01.003	rambu bersuar lainnya (dst)	000001	-			2019							Pembelian	56.230,19	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
162	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000001	-			2007							Pembelian	72.000,00	Pemeliharaan Rambu & Trafic Light

163	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000004	-			2009							Pembelian	253.615,50	Pengadaan Rambu Jalan + Pengadaan Rambu Jalan Tahun 2015 + Reklas Dari Kib D
164	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000005	-			2017							Pembelian	127.844,00	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas + biaya pengawasan
165	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000006 s/d 000009	-		Besi	2020							Pembelian	6.328,89	Jalan Yos Sudarso
166	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000010 s/d 000014	-		Besi	2020							Pembelian	7.911,12	Jalan Dr. Wahidin-Jalan Merdeka-Jalan Thamrin-Jalan Urip Sumoharjo
167	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000015 s/d 000020	-		Besi	2020							Pembelian	9.493,34	Jalan Kerangka Baja-Jalan Hasanuddin-Jalan Kamboja
168	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000021 s/d 000048	-		Besi	2020							Pembelian	44.302,24	Jalan Ruas Simpang Bukit Permai-Simpang Boak 1,2,3,4,5
169	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000049 s/d 000068	-		Besi	2020							Pembelian	31.644,46	Jalan Simpang Kebayan-Simpang Bukit Permai 1,2,3,4
170	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000069 s/d 000072	-		Besi	2020							Pembelian	6.328,89	Jalan Bungur-Simpang Olat Rarang-Jalan Garuda
171	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000073 s/d 000088	-		Besi	2020							Pembelian	25.315,57	Jalan Simpang Olat Rarang-Simpang Kerato 1,2,3
172	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000089	-		Besi	2020							Pembelian	1.582,22	Jalan Melati
173	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000090	-		Besi	2020							Pembelian	1.582,25	Jalan Diponegoro
174	02.18.01.02.002	Rambu Papan Tambahan	000001	-			2007							Pembelian	58.795,40	Papan Nama Jalan
175	02.18.01.02.002	Rambu Papan Tambahan	000002	-			2016							Pembelian	126.944,00	Pengadaan Portal
176	02.18.01.02.011	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	000001	-			2015							Pembelian	71.800,00	Pengadaan Appil Zona Sekolah + Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan
177	02.18.02.05.006	Run Way Traffic Light	000002	-			2016							Pembelian	30.000,00	Pengadaan Road Barrier
178	02.18.02.05.006	Run Way Traffic Light	000003	-			2015						EKSTRA	Pembelian	13.120,00	Pengadaan Traffic Cone
Jumlah Harga															**8.029.497,47**	

MENGETAHUI

Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz,M.Si

NIP. 19651102 199803 1 003

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021

Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP

NIP. 19810122 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000001	Baik	Tidak	Beton	725	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	12/31/2004			Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	1.624.691,50	Bangunan Gedung Kantor Dishubkominfo
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Kantor UPTD PKB	12/31/2008			Tanah Hak Pakai		Pembelian	366.202,34	Rehab Kantor UPTD PKB
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000003	Baik	Tidak	Beton		Dinas Perhubungan	10/28/2019	027/11/Dishub/2019				Pembelian	59.972,21	Rehab Gedung Kantor Dinas Perhubungan + Biaya Perencanaan + Biaya Pengawasan
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.01.01.08.001	000001	Baik	Tidak	Beton	60	Terminal Empang	12/31/1994			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0001	Pembelian	80.079,00	Musholla Di Terminal Empang
5	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000002	Baik	Tidak	Beton		Muara Kali	12/31/2009					Pembelian	26.400,00	Pos Pelayanan Muara Kali
6	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000003	Baik	Tidak	Beton	1	Shelter Langam	12/31/2011					Pembelian	9.000,00	Pembangunan Pos Jaga Shelter Langam
7	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000004	Baik	Tidak	Beton	1		12/31/2012					Pembelian	38.013,89	Pengadaan Konstruksi Rumah Jaga/Pos Jaga
8	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000005	Baik	Tidak	Beton	1		12/31/2012					Pembelian	38.013,89	Pengadaan Konstruksi Rumah Jaga/Pos Jaga
9	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000006	Baik	Tidak	Beton	1		12/31/2012					Pembelian	38.013,89	Pengadaan Konstruksi Rumah Jaga/Pos Jaga

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000007	Baik										Pembelian	5.984,00	Biaya Perencanaan Halte Dan Portal
11	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000008	Baik										Pembelian	38.306,00	Biaya Fisik Pembangunan Halte
12	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000009	Baik										Pembelian	104.819,00	Biaya Fisik Pembangunan Portal
13	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000010	Baik	Tidak	Beton		Simpang Sernu Sumbawa						Pembelian	89.758,00	Pembangunan Pos Jaga Lalu Lintas
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	03.01.01.18.001	000001	Kurang Baik	Tidak	Beton	106	Terminal Alas	12/31/1980			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0001	Pembelian	59.673,00	Kantor Terminal Alas
15	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	03.01.01.18.001	000008	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Pelabuhan Alas	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	156.550,00	Rehab Kantor Pelabuhan Alas
16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	03.01.01.18.001	000009	Kurang Baik	Tidak	Tidak	1000	Labuan Bua	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	250.000,00	Pengerukan Muara Sungai Labuan Bua
17	Bangunan Halte/Shelter	03.01.01.18.004	000001	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Empang	7/14/2020	027/29/KPA/Dishub/2020		Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.462,46	Pembangunan Halte Di Kecamatan Empang (1 Unit)
18	Bangunan Halte/Shelter	03.01.01.18.004	000002	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Utan	7/14/2020	027/29/KPA/Dishub/2020		Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.462,46	Pembangunan Halte Di Kecamatan Utan (1 Unit)
19	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	15	Terminal Bugis	12/31/1984			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	8.022,00	Loket Di Terminal Bugis
20	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000013	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Shelter Langam	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	157.800,00	Rehab Landasan Shelter Langam
21	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000020	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Shelter Langam	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	34.808,40	Rehab Kantor & MCK Shelter Langam
22	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000023	Baik	Tidak	Tidak	2	Pasar Empang	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	9.000,00	Portal Pasar Empang
23	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000024	Baik	Tidak	Tidak	2	Shelter Langam	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	21.500,00	Portal Shelter Langam

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000026	Baik	Tidak	Beton	174.3	Sepanjang Jalan Negara Di Kabupaten Sumbawa	12/31/2007					Pembelian	617.439,40	Pengadaan Marka Jalan + Pengadaan Marka Jalan Tahun 2015 + Pemeliharaan Marka Jalan Tahun 2015 + Reklas Dari Kib D
25	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000027	Baik	Tidak	Beton	1	Terminal Empang	12/31/2008			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0027	Pembelian	596.886,00	Pembangunan Pagar Terminal Empang
26	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000030	Baik	Tidak	Beton	27	Terminal Plampang	12/31/2008					Pembelian	57.300,00	Rehab Ruang Tunggu Plampang
27	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000037	Baik	Tidak	Beton	2	Kecamatan Rhee Dan Kecamatan Alas Barat	12/31/2011					Pembelian	40.000,00	Pembangunan Halte Rhee Dan Alas Barat
28	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000038	Baik	Tidak	Beton		Terminal Empang	4/10/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	310.532,45	Rehabilitasi Bangunan Terminal Empang (rehab lantai)
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	03.01.01.30.002	000001	Baik	Tidak	Tidak		Kantor Dinas Perhubungan	12/31/1994			Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	138.578,00	Bangunan Parkir Di Kantor Dishubkominfo
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	03.01.01.30.002	000002	Baik	Tidak	Beton	300	Terminal Alas	12/31/1994			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	239.784,00	Bangunan Parkir Di Terminal Alas
31	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000001	Kurang Baik	Tidak	Tidak	2	Shelter Seketeng	12/31/2007					Pembelian	9.000,00	Portal Shelter Seketeng
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000002	Baik	Tidak	Tidak	2	Shelter Brang Bara	12/31/2007			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	28.000,00	Portal Shelter Brang Bara
33	Bangunan Penerangan Jalan	03.01.01.32.003	000001	Baik										Pembelian	127.675,00	Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell untuk 5 lokasi tambatan perahu dan biaya retensi pekerjaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000001	Baik	Tidak	Beton	1	Depan SMPN 1 Moyo Hulu	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
35	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000002	Baik	Tidak	Beton	1	Depan MTSN Sumbawa	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
36	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000003	Baik	Tidak	Beton	1	Depan Rumah Sakit Rujukan Propinsi Pulau Sumbawa	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
37	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000004	Baik	Tidak	Beton	1	Depan SMKN 1 Alas	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
38	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000005	Baik	Tidak	Beton	1	Depan SMKN 1 Buer	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
39	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000006	Baik	Tidak	Beton		pembangunan halte di kecamatan utan & Kecamatan Moyo Hilir	12/31/2013			Tanah Hak Pakai		Pembelian	45.000,00	Pembangunan Halte di Kecamatan Utan (1 Unit) & di Kecamatan Moyo Hilir (2 Unit)
40	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000007	Baik	Tidak	Beton		Simpang Pamunga Kecamatan Plampang						Pembelian	30.000,00	Pengadaan Halte Bus
41	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000008	Baik	Tidak	Tidak		Kecamatan Moyo Hilir	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.390,00	Pembangunan Halte
42	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000009	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Plampang	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.390,00	Pembangunan Halte
43	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000010	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Empang	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.390,00	Pembangunan Halte
44	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000011	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Buer	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	51.130,00	Pembangunan Halte + Honor PPK + Honor PPTK + Honor PPHP
45	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000012	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Tarano, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok Dan Kecamatan Moyo Utara	7/1/2019	027/24/KPA/Dishub/2019				Pembelian	232.760,03	Pembangunan Halte + Honor Panitia Penerima Hasil pekerjaan + Honor Pejabat Pembuat Komitmen + Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	000001	Baik	Tidak	Tidak		Desa Juru Mapin Kecamatan Buer				Tanah Milik Negara		Pembelian	28.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) tiang lurus
47	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	000002	Baik	Tidak	Tidak		Kawasan Pasar Empang	7/10/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	56.194,50	Pengadaan dan pemasangan lampu peringatan tenaga surya (warning Light Solar Cell)
48	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	000003	Baik	Tidak	Tidak		Kawasan Pantai Jempol Labuhan Badas	7/10/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	56.194,50	Pengadaan dan pemasangan lampu peringatan tenaga surya (warning Light Solar Cell)
49	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000001	Baik	Tidak	Beton	66	Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes	12/31/2011					Pembelian	95.172,00	Pembangunan Pagar Jalan Di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes
50	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	25	Terminal Labuhan Badas	12/31/1990			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	16.560,00	Pagar Keliling Di Terminal Labuhan Badas
51	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000003	Baik	Tidak	Tidak	68	Peruak Ai Bawi Kecamatan Lantung (Di Tahun 2015)	12/31/2012					Pembelian	575.644,00	Pagar Pengaman Jalan + Pengadaan Guadrail Tahun 2015 + Reklas Pengadaan guadrail Dari Kib E

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000004	Baik	Tidak	Tidak	132	Desa Brang Pelat Kecamatan Sumbawa	12/31/2013					Pembelian	174.817,00	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
53	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000005	Baik	Tidak	Tidak		Desa Semongkat Sampar Kecamatan Batu Lanteh	7/1/2019	027/26/KPA/Dishub/2019				Pembelian	49.974,57	Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadraill)
54	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000006	Baik	Tidak	Beton	52	Ruas Jalan Lantung - Ropang	7/14/2020	027/45/KPA/Dishub/2020		Tanah Milik Pemda		Pembelian	74.255,01	Pembangunan Pagar Pengaman Ruas Jalan Lantung - Ropang
Jumlah Harga															**7.141.056,82**	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz,M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	04.01.02.10.006	000003										Pembelian	6.204.162,18	Baik	Biaya Fisik Pembangunan Tambatan Perahu Labu Ijuk Kecamatan Moyo Hilir + perencanaan dan pengawasan + Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan + Honor Pejabat Pembuat Komitmen + Honor Pejabat Pengelola Teknis + Biaya Fisik Tambatan Perahu Labu Tarujung
2	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	04.01.02.10.006	000004				210	Bugis - Medang Kecamatan Labuhan Badas	1/22/2020	027/81.b/KPA/Dishub/2020	Tanah Milik Pemda		Pembelian	11.302.695,15	Baik	Dermaga Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	04.01.02.10.006	000005					Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas	4/10/2017		Tanah Milik Pemda		Pembelian	9.126.451,00	Baik	Belanja uang muka penyusunan DED + pembayaran uang muka 30% + bayar belanja kedua penyusunan DED + pembayaran uang muka 30% yg kedua + pembayaran termin 1 + bayar termin 3 + pembayaran angsuran kedua + belanja jasa penyusunan UKL-UPL Pembangunan Dermaga
4	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	04.02.05.06.005	000001					Muara Kali Kecamatan Labuhan Badas					Pembelian	27.357,00	Baik	Pengadaan Border + Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan Fasilitas Keselamatan
5	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	04.02.06.03.002	000001					Terminal Sumer Payung	12/31/2013				Pembelian	70.110,50	Baik	Pengadaan Jaringan Air Bersih Kios Terminal Sumer Payung

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	04.02.06.03.002	000002					Pos Jaga Lalu Lintas Simpang Karaci Dan Simpang La					Pembelian	11.796,00	Baik	Pengadaan Instalasi Air Bersih MCK Pos Jaga Lalu Lintas
7	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	04.02.06.03.002	000003					Pos Polisi Lapangan Pahlawan					Pembelian	15.000,00	Baik	Pembangunan MCK dan Instalasi Air Bersih
8	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	04.04.03.01.001	000001				1	UPTD PKB					Pembelian	14.948,50	Baik	Instalasi Telepon Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Harga														**26.772.520,33**		

MENGETAHUI

Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz,M.Si

NIP. 19651102 199803 1 003

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021

Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP

NIP. 19810122 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pem-belian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifi-kasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Musik	05.01.01.08.007	000001	-		-	-	-	-		1	Pembelian	1998	4.928,00	Orgen / Elektone
Jumlah Harga														**4.928,00**	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz,M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

umbawa Besar, 1 Januari 202
Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl, Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kapal Motor	1	Tidak	Tidak	0		12/2/2019		12/2/2019		00.00.00.00.000.0000	Pembelian	99.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Kapal Kapasitas 20 Penumpang
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tidak	Beton	1119	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa	6/1/2020	027/ /KPA/Dishub/2020	6/3/2020	Tanah Milik Pemda		Pembelian	9.905,50	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
Jumlah Harga											**108.905,50**			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz,M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009

2.3 Kinerja Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

Pada sub bagian ini, akan disajikan dan dideskripsikan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian-capaian yang tidak sesuai target yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah arus penumpang (multi moda) yang terlayani (orang)				21,72	42	62,29	82,58	102,86	49,38	121,6	124,8	111,3	53,3	2,3	2,9	2	1,4	0,52
2	Persentase layanan Angkutan Darat				0,07	0,04	0,03	0,04	0,05	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	1	1	1	0,8	0,6
3	Rasio Ijin Trayek				0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	1	1	1	0,5	0,2
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan				1,29	1,2	1,2	1,2	1,2	1,29	1,2	1,2	0,58	2,41	1	1	1	0,5	2

Berdasarkan tabel TC-23, capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Pelayanan/Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
   a. Persentase peningkatan arus penumpang.

      Jumlah arus penumpang (multi-moda) terdiri dari jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun (orang), jumlah arus penumpang angkutan laut per tahun (orang), dan jumlah arus penumpang angkutan udara per tahun (orang). Jumlah arus penumpang angkutan umum variatif dari tahun ke tahun, dan mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2017, Jumlah arus penumpang angkutan umum Tahun 2019 sebanyak 1.001.660 meningkat sebesar 100,34% dari jumlah penumpang pada Tahun 2018, hal ini mengindikasikan meningkatnya kinerja angkutan umum di Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai indikasi meningkatnya pelayanan di terminal Sumer Payung, mengingat pengelolaannya sudah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI sejak 1 januari 2017. Hal tersebut berdampak pada kinerja antara lain bertambah efektifnya pelayanan dan pencatatan/update data di Terminal Sumer Payung. Tahun 2020 jumlah arus penumpang (multi-moda) mengalami penurunan sebanyak 554.887, penurunan ini

diakibatkan karena adanya pembatasan aktifitas warga yang keluar masuk ke daerah/wilayah lain sebagai akibat dari mewabahnya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020. Realisasi capaian disajikan dalam tabel Jumlah Arus Penumpang (multi moda) Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Sasaran Strategis I	**Indikator Kinerja Utama**	**Realisasi Capaian (orang)**				
		2016	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase peningkatan arus penumpang (multi moda) yang terlayani	49,38	121,60	124,8	111,30	51,81

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

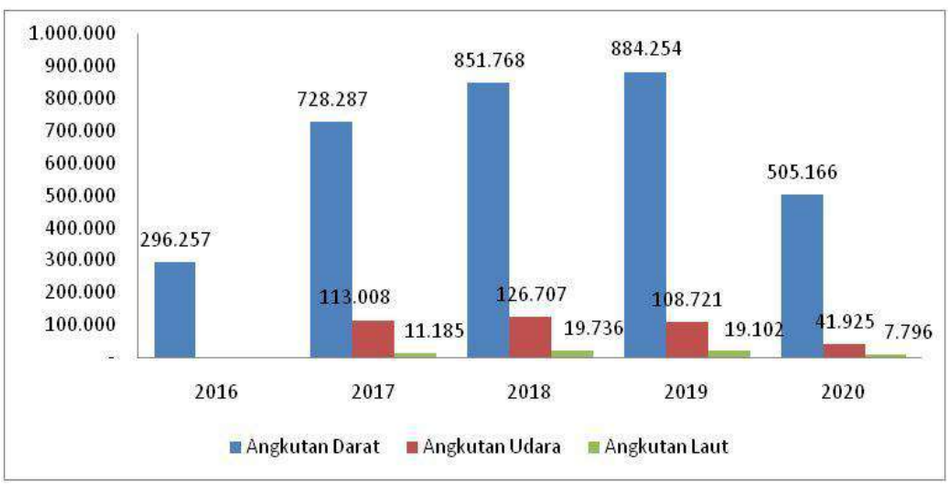

Grafik Jumlah Arus Penumpang Multi Moda

Jumlah arus penumpang angkutan umum dicatat berdasarkan arus penumpang naik dan penumpang turun di Terminal Sumer Payung Sumbawa Besar pada Tahun 2020 sebanyak 505.166 orang terdiri dari penumpang AKAP sebanyak 54.065 orang, penumpang AKDP sebanyak 410.015 orang, penumpang Angkutan Kota sebanyak 34.662 orang, penumpang angkutan perdesaan sebanyak 6.424 orang, dan penumpang angkutan Jemaah Haji (PP) untuk Tahun 2020 tidak ada karena penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini ditiadakan sebagai akibat dari adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2020

No.	**JENIS KENDARAAN**	**Tahun**	
		2019	**2020**
1	2	3	4
1	AKAP	111.776	54.065
2	AKDP	705.979	410.015
3	Angkutan Kota	16.242	34.662
4	Angkutan Perdesaan	49.659	6.424

No.	JENIS KENDARAAN	Tahun	
		2019	2020
1	2	3	4
5	Angkutan Haji (PP)	598	-
	Jumlah	884.254	505.166

** Penumpang Jemaah Haji Tahun 2019 menggunakan armada angkutan umum dan dicatat oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa*

Jumlah arus penumpang angkutan laut dicatat berdasarkan arus penumpang naik dan turun di Pelabuhan Badas Sumbawa Besar. Berdasarkan laporan Kantor Kasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas, jumlah penumpang angkutan laut yang dicatat di Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Rakyat Tahun 2020 sebanyak 10.195 orang, terdiri dari penumpang di Pelabuhan Nusantara sebanyak 7.517 orang, dan penumpang di Pelabuhan Rakyat sebanyak 2.678 orang.

Data Arus Penumpang di Pelabuhan Badas Tahun 2020

No	BULAN	PENUMPANG			
		PELABUHAN NUSANTARA		PELABUHAN RAKYAT	
		NAIK	TURUN	NAIK	TURUN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	974	1.191	423	372
2	Pebruari	728	719	197	169
3	Maret	231	244	100	147
4	April	237	316	212	138
5	Mei	80	65	116	128
6	Juni	39	34		
7	Juli	57	52	5	9
8	Agustus	30	57	21	23
9	September	31	33	39	30
10	Oktober	76	1.022	248	71
11	November	81	773	45	86
12	Desember	75	372	20	79
Jumlah		2.639	4.878	1.426	1.252
Total		7.517		2.678	

Jumlah arus penumpang angkutan udara dicatat berdasarkan arus penumpang naik dan turun di Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa Besar. Berdasarkan laporan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar, aktivitas Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar adalah melayani penerbangan domistik, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 698 trip pesawat terdiri dari keberangkatan sebanyak 349 kali dan kedatangan sebanyak 349 kali. Sedangkan jumlah penumpang di terminal kedatangan dan keberangkatan tahun 2020 sebanyak 41.925 orang terdiri dari kedatangan sebanyak 20.566 orang dan keberangkatan sebanyak 21.308 orang. Aktivitas Bandar udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar sebagai berikut:

Aktivitas Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar Tahun 2020

No	Bulan	Jenis Penerbngan	PESAWAT		Penumpang		
			DTG	BRK	DTG	BRK	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Domestic	61	60	4.106	4.325	8.431
2	Februari	Domestic	62	62	4.048	4.120	8.168
3	Maret	Domestic	56	57	3.434	4.006	7.440
4	April	Domestic	58	58	3.439	3.033	6.472
5	Mei	Domestic	24	25	1.073	922	1.995
6	Juni	Domestic					
7	Juli	Domestic					
8	Agustus	Domestic					
9	September	Domestic					
10	Oktober	Domestic					
11	November	Domestic	31	31	1.720	2.015	3.735
12	Desember	Domestik	57	56	2.779	2.887	5.666
Jumlah			**349**	**349**	**20.566**	**21.308**	**41.925**

**Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar.*

Berdasarkan pengukuran capaian indicator kinerja Jumlah arus penumpang (multi-moda) yang terlayani Tahun 2020, ditargetkan sebesar 102,86% hanya terealisasi sebesar 53,30% atau mengalami penurunan sebesar 51,81% dari target, hal ini disebabkan karena adanya pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) sehinggga masyarakat yang bepergian ke luar daerah jumlahnya berkurang.

b. Persentase layanan Angkutan Darat

Persentase layanan Angkutan Darat dihitung menggunakan formula jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikalikan 100%. Jumlah angkutan darat atau angkutan penumpang Tahun 2020 sebanyak 77 unit, sedangkan jumlah penumpang Tahun 2020 sebanyak 505.166 orang. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Persentase layanan Angkutan Darat Tahun 2020 terealisasi sebesar 0,03% atau terealisasi sebesar 60% dari target. Persentase layanan angkutan darat tahun 2020 tidak berbeda signifikan dengan persentase layanan angkutan darat Tahun 2019 yang lalu.

Persentase layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)				
		2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.Terwujudnya penyelenggaran pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Layanan Angkutan Darat	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

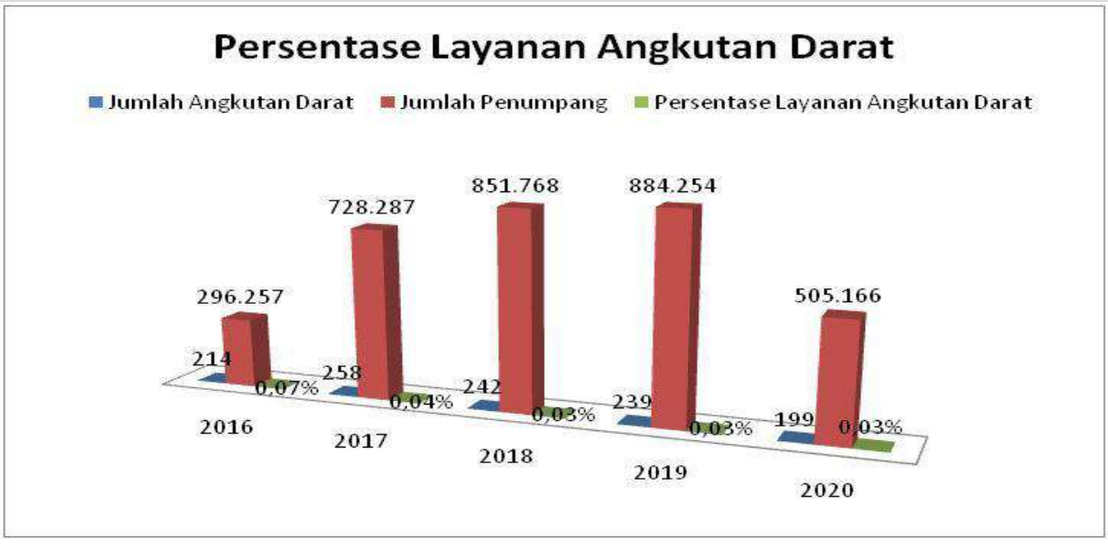

Grafik Jumlah Angkutan Darat dan Jumlah Penumpang
(Persentase Layanan Angkutan Darat)

c. Rasio Ijin Trayek

Pada tahun 2017 Rasio ijin tarayek dihitung menggunakan formula perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Ijin Tayek yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota adalah ijin trayek untuk angkutan perkotaan dan perdesaan, berdasarkan data permohonan ijin trayek Tahun 2017, telah direalisasikan sebayak 153 ijin trayek angkutan kota/perdesaan, sedangkan untuk AKAP, AKDP, dan kendaraan angkutan tertentu yang beroperasi dan memiliki ijin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi/Pusat sebanyak 105 unit angkutan. Dengan demikian maka rasio ijin trayek Tahun 2017 adalah sebesar 0,000579 dengan jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 445.503 jiwa atau secara proporsional 1:1.727. untuk tahun 2018 Rasio Ijin Trayek dihitung berdasrkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari Izin trayek Angkutan Perkotaan sebanyak 19 ijin dan Trayek Angkutan Pedesaan sebanyak 118 ijin. Rasio Izin Trayek Tahun 2018 1:3.252 atau 0,03 %.

Ijin trayek yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari ijin trayek untuk angkutan perdesaan dan ijin trayek untuk angkutan kota. Rasio Ijin Trayek Tahun 2019 yang dihitung berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari Izin trayek Angkutan Perkotaan sebanyak 12 ijin dan Trayek Angkutan Pedesaan sebanyak 93 ijin, tidak berbeda dengan Tahun 2018 jika rasio ijin trayek dihitung sesuai kewenganan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Demikian juga untuk tahun 2016 dan 2017 perbedaannya

tidak terlalu signifikan. Rasio izin trayek tahun 2019 mengalami penurunan dari 0,03% tahun 2018 menjadi 0,02% ditahun 2019. Jumlah ijin trayek di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebanyak 77 ijin yang terdiri dari 8 ijin trayek perkotaan dan 69 ijin trayek pedesaan. Tahun 2020 ijin trayek yang dikeluarkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Ini berarti bahwa setiap 1 rekomendasi trayek yang diberikan terkait dengan pelayanan transportasi kepada 6.686 penduduk atau dari 77 rekomendasi yang diberikan terhadap jumlah penduduk maka persentase rekomendasi yang diberikan adalah 0,01%. Rasio ijin trayek tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk.

Rasio Ijin Trayek Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis I	**Indikator Kinerja Utama**	**Realisasi Capaian (%)**				
		2016	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Rasio Ijin Trayek	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

Jumlah Ijin Trayek dan Rasio Ijin Trayek yang diterbitkan bervariasi dari tahun ke tahun seperti tampak dibawah ini :

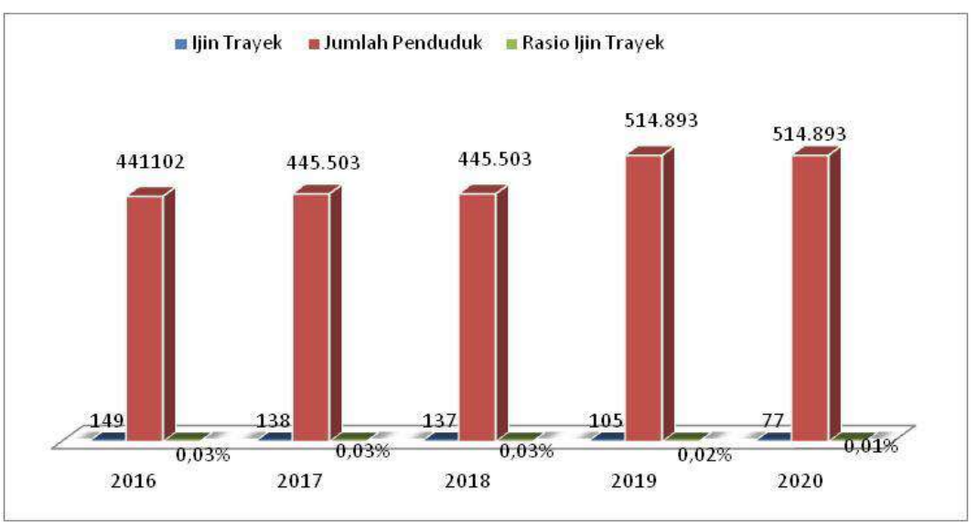

Grafik Ijin Trayek dan Jumlah Penduduk (Rasio Ijin Trayek)

2. Capaian kinerja sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar teknis kebijakan transportasi.

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan tahun 2016 - 2020

Sasaran Strategis II	**Indikator Kinerja Utama**	**Realisasi Capaian (%)**				
		2016	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar teknis kebijakan transportasi	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	1,29	1,20	1,20	0,58	0,53

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumbawa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2020 berupa Rasio *panjang jalan per jumlah kendaraan* menunjukkan capaian sebesar 17,20%. dari target yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 sebesar 11,50%, maka dibandingkan target RPJMD Kabupaten Sumbawa dengan tingkat realisasi sebesar 149,57% , Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

Panjang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tetap sebesar 1.541 Km, sedangkan untuk tahun 2020 ada penambahan data jalan desa sepanjang 241 Km, sehingga total panjang jalan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 sepanjang 1.782 Km. Penambahan jumlah kendaraan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meningkat. Untuk tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa per 1 km sebanyak 190 unit kendaraan bermotor dengan perhitungan pembagian jumlah kendaraan tahun 2020 sebanyak 338.435 dibagi panjang jalan 1.782. Jadi Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1/10 km pada tahun 2020 19,00%, 17,20% pada tahun 2019, 8,30% tahun 2018. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan seperti tampak pada grafik di bawah ini :

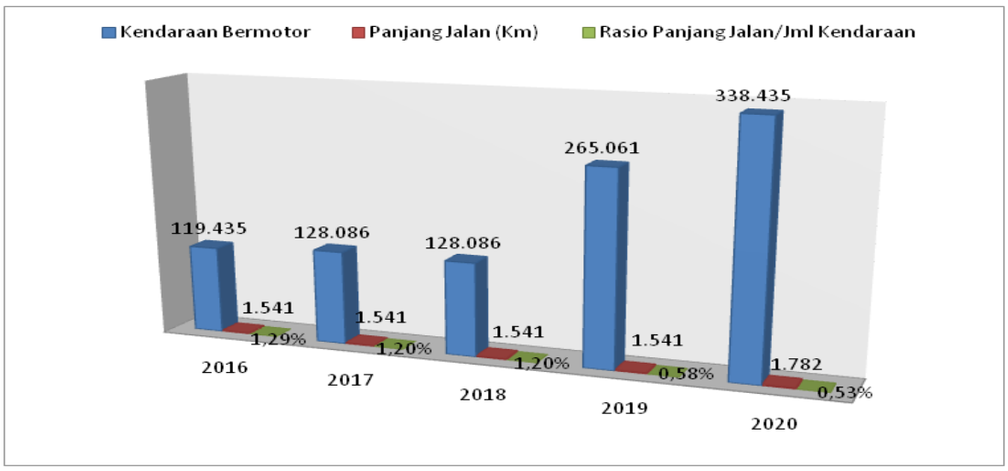

Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan

b. Realisasi Target Rencana Strategis (Renstra 2016-2021)

Realisasi target renstra diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran dan indikator program (outcome). Realisasi capaian kinerja dimaksud merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan selama periode renstra (2016-2021).

(1) Realisasi target indikator sasaran merupakan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

a) Persentase peningkatan arus penumpang (multi moda) yang terlayani (orang) terealisasi sebesar 51,81% dari target yang ditetapkan dalam renstra 2016-2021, pada realisasi pada tahun 2016 yang dihitung hanya Jumlah arus penumpang angkutan darat karena belum tersedianya data penumpang angkutan laut dan udara.

b) Persentase Layanan Angkutan Darat, terealisasi sebesar 60% dari target yang ditetapkan.

c) Rasio Ijin Trayek, terealisasi sebesar 20% dari target yang ditetapkan.

d) Rasio Panjang jalan per jumlah Kendaraan Bermotor, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 2,42% atau mengalami peningkatan sebesar 201,66%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan panjang jalan yaitu panjang jalan desa dan adanya penurunan jumlah kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19.

(2) Realisasi target indikator Program (outcome)

Realisasi kinerja atau capaian kinerja dari indikator program yang ditetapkan dalam renstra 2016-2021, untuk tahun 2016 realisasinya rata-rata 105 % dari target yang ditetapkan, capaian ini

dipengaruhi oleh dibangunnya perlengkapan jalan (Portal) yang tidak ditargetkan namun penting dilaksanakan dengan pertimbangan mangatasi kesemrautan Lalu Lintas di wilayah perkotaan. Untuk tahun 2017 realisasinya 103%, tingginya capaian ini dipengaruhi oleh terlaksananya pembangunan Dermaga Rakyat di desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, dimana kegiatan tersebut tidak direncanakan/ditargetkan pada renstra untuk tahun 2017. Untuk tahun 2018 terealisasi sebesar 90%, capaian ini disebabkan karena rendahnya realisasi dan rendahnya alokasi anggaran pada program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Dan untuk tahun 2019 juga terealisasi sebesar 90% hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 berasal dari dana DAK yang pengerjaan fisiknya baru mencapai 79% dan realisasi keuangannya mencapai 63,69%. Tahun 2020 realisasi capaian kinerja terealisasi sebesar 77%, capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian belanja pasca refocusing penanganan covid-19 sesuai dengan Instruksi Bupati Sumbawa No.4 Tahun 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

3. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2016-2021

Kinerja pembangunan bidang perhubungan selama Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan sejumlah alokasi penganggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Target dan realisasi pendapatan dan belanja pembangunan bidang perhubungan Tahun 2016-2021 seperti disajikan pada Tabel TC-24.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PENDAPATAN	**2.175.715.000**	**617.835.000**	**1.233.930.000**	**1.361.600.000**	**530.800.000**	**972.014.603**	**536.602.140**	**1.192.596.400**	**1.234.932.866**	**599.269.372**	**0,45**	**0,87**	**0,97**	**0,91**	**1,13**	**- 328.983.000**	**- 74.549.046**
Retribusi	**2.175.715.000**	**617.835.000**	**1.233.930.000**	**1.361.600.000**	**530.800.000**	**972.014.603**	**536.602.140**	**1.192.596.400**	**1.234.932.866**	**599.269.372**	**0,45**	**0,87**	**0,97**	**0,91**	**1,13**		
Retribusi Jasa Umum	**1.887.000.000**	**525.000.000**	**550.000.000**	**600.000.000**	**450.000.000**	**801.371.243**	**472.020.000**	**525.047.500**	**535.199.150**	**492.453.950**	**0,42**	**0,90**	**0,95**	**0,89**	**1,09**		
Retribusi Parkir di tepijln umum	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	167.088.000	73.770.000	121.445.000	157.695.000	191.125.000	0,84	0,37	0,61	0,79	1,27		
Pengujian Kendaraan Bermotor	325.000.000	325.000.000	350.000.000	400.000.000	300.000.000	344.827.500	398.250.000	403.602.500	377.504.150	301.328.950	1,06	1,23	1,15	0,94	1,00		
Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.362.000.000					289.455.743					0,21						
Retribusi Jasa Usaha	**265.645.000**	**69.765.000**	**66.965.000**	**80.800.000**	**80.800.000**	**154.843.360**	**56.307.140**	**71.250.700**	**82.267.283**	**106.815.422**	**0,58**	**0,81**	**1,06**	**1,02**	**1,32**		
Terminal	145.980.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	65.141.000	6.520.000	5.500.000	8.140.000	17.140.000	0,45	0,38	0,32	0,48	1,00		
Jasa Pelabuhan	17.328.000	17.328.000	21.728.000	22.500.000	22.500.000	22.697.360	23.388.200	19.890.700	29.757.283	34.215.422	1,31	1,35	0,92	1,32	1,52		
Sewa kios/MCK terminal	72.400.000	8.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	40.005.000	1.650.000	330.000	570.000	1.210.000	0,55	0,20	0,28	0,48	1,01		
Retribusi tempat khusus parkir	29.937.000	26.937.000	26.937.000	40.000.000	40.000.000	27.000.000	24.748.940	45.530.000	43.800.000	54.250.000	0,90	0,92	1,69	1,10	1,36		
Retribusi Perizinan Tertentu	**23.070.000**	**23.070.000**	**616.965.000**	**680.800.000**	**0**	**15.800.000**	**8.275.000**	**596.298.200**	**617.466.433**	**0**	**0,68**	**0,36**	**0,97**	**0,91**			
Ijin Trayek	23.070.000	23.070.000	616.965.000	680.800.000		15.800.000	8.275.000	596.298.200	617.466.433		0,68	0,36	0,97	0,91			
Lain-lain PAD yang sah/penerimaan lain-lain																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	**11.290.883.955**	**17.669.911.198**	**8.841.905.461**	**17.344.265.374**	**10.085.296.212**	**10.136.773.354**	**14.498.568.052**	**7.979.469.075**	**13.009.103.547**	**9.998.112.799**	0,90	0,82	0,90	0,75	0,99		
Belanja Tidak Langsung	**5.689.970.135**	**3.737.356.598**	**3.579.292.761**	**3.754.259.933**	**3.730.654.266**	**5.226.806.720**	**3.485.879.388**	**3.418.700.142**	**3.620.568.853**	**3.688.524.000**	0,92	0,93	0,96	0,96	0,99		
Gaji dan tunjangan	4.761.770.135	2.879.116.598	2.710.004.511	2.806.999.933	2.818.442.266	4.495.948.720	2.840.565.588	2.611.676.342	2.747.580.895	2.786.126.580	0,94	0,99	0,96	0,98	0,99		
Tambahan Penghasilan PNS	928.200.000	858.240.000	869.288.250	947.260.000	912.212.000	730.858.000	645.313.800	807.023.800	872.987.958	902.397.420	0,79	0,75	0,93	0,92	0,99		
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah																	
Belanja Langsung	**5.600.913.820**	**13.932.554.600**	**5.262.612.700**	**13.590.005.441**	**6.354.641.946**	**4.909.966.634**	**11.012.688.664**	**4.560.768.933**	**9.388.534.694**	**6.309.588.799**	**0,88**	**0,79**	**0,87**	**0,69**	**0,99**		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587.512.720	791.961.550	524.640.150	438.505.550	297.180.025	525.329.984	618.818.309	468.181.231	397.473.071	282.056.087	0,89	0,78	0,89	0,91	0,95		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.433.100	216.511.000	81.795.600	109.585.000	55.011.331	114.945.100	211.165.450	73.735.600	108.663.806	51.698.431	0,97	0,98	0,90	0,99	0,94		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.844.800	21.481.300	17.702.800	3.475.600	4.821.200	8.624.800	14.705.300	15.852.800	3.445.600	4.798.200	0,98	0,68	0,90	0,99	1,00		
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10.334.000	36.625.000	30.495.000	33.236.400	33.275.400	10.333.400	35.272.750	28.886.500	32.086.400	32.440.400	1,00	0,96	0,95	0,97	0,97		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	321.738.500	752.718.000	243.761.500	150.000.000	173.827.400	18.069.000	568.032.000	228.456.500	150.000.000	173.827.400	0,06	0,75	0,94	1,00	1,00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	1.576.421.000	188.086.000	44.926.000	24.000.000	89.450.000	1.543.457.700	184.590.280	43.945.100	23.300.000	87.655.000	0,98	0,98	0,98	0,97	0,98		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	813.131.200	1.153.884.350	1.151.750.600	1.105.039.900	999.272.600	761.387.500	1.060.648.625	1.106.086.152	1.080.946.370	977.197.100	0,94	0,92	0,96	0,98	0,9		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	791.879.200	10.771.287.400	3.167.541.050	11.726.162.991	4.701.803.990	722.355.750	8.319.455.950	2.595.625.050	7.592.619.447	4.699.916.181	0,91	0,77	0,82	0,65	1,00		
Program Pemanfaatan potensi sektor pos dan Telekomunikasi	181.100.000					174.380.100					0,96						
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	33.754.500					24.626.500					0,73						
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	30.880.000					26.365.000					0,85						
Program Kerjasama Informasi dan media Massa	271.540.800					204.938.800					0,75						
Program Pengembangan Teknologi Informatika	855.344.000					775.153.000					0,91						

Akuntabilitas kinerja keuangan pembangunan bidang perhubungan merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selama periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

2.3 PENDAPATAN

Secara umum baik target maupun realisasi anggran pendapatan selama periode tersebut mengalami pasang surut. Tren peningkatan realisasi PAD Tahun 2016-2020 disajikan pada grafik di bawah ini :

Grafik Realisasi PAD Tahun 2016-2020

Capaian kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan selama Tahun 2016-2020 peningkatannya mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal capaian yang terjadi pada kurun waktu tersebut, meskipun di tahun 2019 realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Kondisi capaian yang dimaksud sebagai berikut:

Kondisi capaian Tahun 2016 :

- Secara global PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk Tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Target yang dicapai pada tahun 2016 ini sebesar 44,73% dibandingkan pada Tahun 2015 yang mencapai target sebesar 66,34% yakni mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya retribusi pendapatan dari beberapa sektor meskipun sektor lainnya ada yang mencapai target serta beberapa kendala lainnya.
- Target Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan sebesar Rp. 1.887.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 801.371.245,- atau 42,46%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa retribusi pendapatan yang belum mencapai target diantaranya yaitu retribusi menara

telekomunikasi. Pada tahun 2015 pencapaian retribusi menara telekomunikasi yaitu sebesar Rp. 1.394.914.346,- namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 289.455.743,- hal ini disebabkan karena masih adanya piutang retribusi menara yang masih belum terselesaikan pada tahun 2014, selain itu untuk retribusi tahun 2016 belum dapat dilakukan penagihan kepada para provider selaku wajib retribusi, mengingat rancangan Perda Kabupaten Sumbawa tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai dasar hukum untuk melakukan penagihan, belum diundangkan.

- Pada retribusi pengujian kendaraan bermotor target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 344.827.200,- atau 106,1% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 dari segi target maupun realisasi. Kendati demikian hal ini belum dapat meningkatkan retribusi PAD secara keseluruhan karena banyak sektor-sektor lain yang masih jauh dari pencapaian target dari yang telah ditentukan.
- Sedangkan retribusi pelayanan parkir tidak mencapai target, dari yang ditargetkan sebesar Rp.200.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.167.088.000,-. Hal tersebut disebabkan karena retribusi parkir tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab pada dasarnya setiap pungutan retribusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Terkait dengan retribusi pelayanan parkir maka sejak penentuan target retribusi haruslah diketahui berapa sesungguhnya potensi titik parkir yang ada untuk kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa sebagai dasar pungutan retribusi parkir, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Sumbawa tentang lokasi parkir idealnya harus ditetapkan setiap tahun seiring berkembangnya aktifitas masyarakat. Maka untuk tahun 2016 pungutan retribusi parkir tidak diatur dengan Keputusan Bupati Sumbawa karena Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 940 Tahun 2011 hanya mengatur titik maupun pungutan retribusi parkir tahun 2011, hal ini disebabkan oleh fakta di lapangan bahwa banyak titik parkir yang berada diluar ketentuan yang berlaku sehingga bila ditetapkan sebagai lokasi parkir akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pasal 12 serta penjelasan pasal 38 PP 34 Tahun 2004. Terkait dengan aktifitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa menyadari bahwa ketertiban dan keselamatan transportasi merupakan suatu hal yang prioritas, sehingga sepanjang tidak mengganggu lalu lintas maka aktifitas parkir tersebut dapat dimaklumi sekaligus mengurangi dampak sosial yang mungkin terjadi karena faktanya juru pungut atau msyarakat yang melakukan aktifitas parkir di lokasi dimaksud adalah warga sekitar lokasi tersebut. Sementara untuk parkir yang dipungut dititik parkir diluar ketentuan yang berlaku sebagaimana fakta di lapangan adalah dipergunakan untuk biaya operasional pengawas parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum pada BAB XIV bagian ketiga pasal 71 yang berbunyi "pemanfaatan dari Penerima Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan langsung dengan penyelenggaraan jasa umum yang bersangkutan".

- Target Retribusi jasa Usaha ditetapkan sebesar Rp.262.725.000,- terealisasi sebesar Rp.154.843.360,- Tidak mencapai target disebabkan karena tidak adanya peningkatan beberapa pos antara lain Sewa kios/MCK/PKL dan Retribusi terminal. Hal ini disebabkan karena seiring dengan perkembangan jaman dan majunya teknologi khususnya di bidang transportasi, masyarakat yang dulunya bepergian memakai angkutan umum (bus, angkot) naik dan turun di terminal sedangkan sekarang masyarakat banyak memakai kendaraan pribadi, lancarnya transportasi udara dan masih banyak moda-moda transportasi lain yang digunakan masyarakat sehingga berpengaruh kepada semua jenis penerimaan PAD pada Terminal Sumer Payung Sumbawa.
- Retribusi Ijin Trayek Target yang ditetapkan sebesar Rp.23.070.000,- terealisasi Rp.15.580.000,- atau 67,53% disebabkan karena kurangnya kesadaran Pemilik/Pengusaha Angkutan untuk memperpanjang Izin Trayek.

Kondisi capaian Tahun 2017 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 617.835.000,- realisasinya sebesar Rp. 534.553.200,- atau sebesar 86,52% dari target yang ditetapkan. Target pendapatan atau retribusi pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena di tahun 2017 ini tdk ada lagi Retribusi Pengendalian Menara

telekomunikasi karena dinas perhubungan komunikasi dan informatika terpisa menjadi dinas perhubungan dan dinas komunikasi dan informatika. Namun demikian realisasinya tetap berkurang dari target yang ditetapkan.

- Target retribusi jasa umum tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umumdan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 89,91% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 472.020.000,- dengan rincian realisasiretribusi pelayanan parkir di tepi jalan umumsebesar 36,89% dari target atau sebesar Rp. 73.770.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 122,54% dari target atau sebesar Rp. 398.250.000,-. Rendahnya realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,sebesar 36,89% dari target yang ditetapkan, salah satunya disebabkan oleh retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2017 dipungut dan disetor ke Kas Daerah mulai tanggal31 Mei s/d 31 Desember 2017, hal ini disebabkan oleh kompensasi yang diberikan kepada pihak ketiga (pemenang beauty contes pengelola perparkiran tahun 2016) untuk melaksanakan pengelolaan perparkiran mulai 1 Januari s/d 30 Mei 2017 yang dimaksudkan untuk mengganti uang kesungguhan pemenang beauty contes pengelola perparkiran tahun 2016 sebesar Rp. 40.500.000,- yang terlanjur dicatat dan disetor ke Kas Daerah sebagai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2016 sehingga jumlah kewajiban pemenang beauty contes pengelola perparkiran tahun 2016 melebihi jumlah yang disepakati.
- Target retribusi jasa usaha tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 69.765.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan.Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 80,71% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 56.307.140,-dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 19,64% dari target atau sebesar Rp. 1.650.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 38,13% dari target atau sebesar Rp. 6.520.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 91,88% atau sebesar Rp. 24.748.940, dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 134,97% dari target atau sebesar Rp. 23.388.200. Rendahnya realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal disebabkan oleh pungutan retribusi sewa

kios/MCK/PKL dan retribusi terminal dilaksanakan di Terminal Type C (terminal Empang) dimana retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal baru dapat dipungut dan disetor ke Kas Daerah pada bulan Juni 2017.

Kondisi capaian Tahun 2018 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 616.965.000,- realisasinya sebesar Rp. 596.298.200,-atau sebesar 96,65% dari target yang ditetapkan.Secara rinci target dan realisasi pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut.
- Retribusi Jasa Umum Target retribusi jasa umum tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 550.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umumdan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 95,46% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 525.047.500,- dengan rincian realisasiretribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 60,72% dari target atau sebesar Rp. 121.445.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 115,32% dari target atau sebesar Rp. 403.602.500,-. Rendahnya realisasi retribusi parkir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan system yang belum sepenuhnya berjalan, hal ini dapat terindentifikasi dari beberapa temuan inspektorat Kabupaten Sumbawa yang segera ditindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usahatahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 66.965.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan.Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 106,40% dari target yang ditetapkan atau sebesarRp. 71.250.700,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 27,50% dari target atau sebesar Rp. 330.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 32,16% dari target atau sebesar Rp. 5.500.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 169,02% atau sebesar Rp. 45.530.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 91,54% dari target atau sebesar Rp. 19.890.700,-. Rendahnya realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal disebabkan oleh pungutan retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal dilaksanakan di Terminal Type C (terminal Empang) dimana retribusi sewa

kios/MCK/PKL dan retribusi terminal belum efektif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan salah satunya kurangnya tenaga/pegawai di Terminal Empang.

Kondisi capaian Tahun 2019 :

- Retribusi Jasa Umum Target retribusi jasa umum tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 89,20% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 535.199.150,- dengan rincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 78,85% dari target atau sebesar Rp. 157.695.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 94,38% dari target atau sebesar Rp. 377.504.150,-. Rendahnya realisasi retribusi parkir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan system yang belum sepenuhnya berjalan, hal ini dapat terindentifikasi dari beberapa temuan inspektorat Kabupaten Sumbawa yang segera ditindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usaha tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 80.800.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 101,82% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp.82.267.283,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 47,50% dari target atau sebesar Rp. 570.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 47,60% dari target atau sebesar Rp. 8.140.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 109,50% atau sebesar Rp. 43.800.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 132,25% dari target atau sebesar Rp. 29.757.283,-. Rendahnya realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal disebabkan oleh pungutan retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal dilaksanakan di Terminal Type C (terminal Empang) dimana retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal belum efektif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan salah satunya kurangnya tenaga/pegawai di Terminal Empang.

Kondisi capaian Tahun 2020 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp.

530.800.000,- realisasinya sebesar Rp. 599.269.372,- atau sebesar 112,90% dari target yang ditetapkan.

- Retribusi Jasa Umum Target retribusi jasa umum tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 450.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 109,43% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 492.453.950,- dengan rincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 127,42% dari target atau sebesar Rp. 191.125.000,- dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 100,44% dari target atau sebesar Rp. 301.328.950,-. Sejak bulan November 2020 hingga Desember 2020 target untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diturunkan yang semula sebesar Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 150.000.000,- sedangkan target retribusi pengujian kendaraan bermotor juga diturunkan dari Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 300.000.000,- Berkurangnya target disebabkan karena pertimbangan adanya pandemi covid-19 yang membatasi warga untuk keluar rumah.
- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usaha tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 80.800.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 132,20% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 106.815.422,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 100,83% dari target atau sebesar Rp. 1.210.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 100,23% dari target atau sebesar Rp. 17.140.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 1135,63% atau sebesar Rp. 54.250.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 152,07% dari target atau sebesar Rp. 34.215.422,-.
- Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan untuk tahun 2020 telah melampaui target, baik itu Retribusi Jasa Umum maupun Retribusi Jasa Usaha.

2.4 BELANJA

Target dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 seperti disajikan pada tabel TC-24, dari tahun ke tahun relatif mengalami naik turun/pasang surut. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran untuk dinas perhubungan

tergantung kondisi keuangan daerah. Anggaran belanja digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang yang terdiri dari program/kegiatan rutin dan program/kegiatan prioritas. Perkembangan realisasi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik Realisasi Belanja Tahun 2016-2020

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan bidang perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selama Tahun 2016-2020 adalah:

a) Kinerja pelayanan bidang perhubungan dititik beratkan pada kinerja pelayanan penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Sumbawa. Secara umum tujuan dari penyelenggaraan transportasi adalah mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan selamat. Selama kurun waktu Tahun 2016-2021 pelayanan transportasi terus ditingkatkan baik dari sisi kesiapan sarana prasarana maupun dari sisi pengguna jasa transportasi. Ditinjau dari sisi kesiapan sarana dan prasarana perhubungan diperlukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan regulasi yang ada sehingga sarana dan prasarana sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dari sisi pengguna jalan, Tantangan menuju angka kecelakaan nol (*zero accident*) terutama disebabkan disiplin pengguna jalan yang masih rendah, memerlukan usaha tersendiri untuk memecahkannya baik melalui pendidikan kesadaran berlalu lintas bagi pengguna jalan khususnya generasi muda maupun melalui penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

b) Pembangunan infrastruktur Bidang Perhubungan

Pembangunan infrastruktur perhubungan akan sangat berperan dalam proses pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur perhubungan akan

membuka konektivitas antar wilayah dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Hingga akhir tahun 2021, infrastruktur transportasi di Kabupaten Sumbawa masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ketersediaan terminal Type C di tiga Kecamatan (Kec. Plampang. Kec Utan, dan Kec. Alas) sangat penting sebagai antisipasi pengembangan wilayah kota, perlunya terminal barang agar truk/angkutan barang tidak masuk ke dalam kota, rusaknya dermaga pelabuhan Alas perlu mendapat perhatian serius pada kurun waktu 2021-2026. Pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang perhubungan dimungkinkan dilaksanakan secara lebih komprehensif dan terencana dengan melibatkan semua pihak terutama peran optimal Forum Lalu Lintas di Kabupaten Sumbawa.

c) Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, salah satunya mengamanatkan pembentukan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang perhubungan. Dengan demikian pembangunan bidang perhubungan menjadi semakin mendapat perhatian seiring dengan terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dimana tugas pokoknya adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjaDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Hal tesebut merupakan peluang pengembangan pelayanan bidang perhubungan, khususnya dalam mengatasi tantangan-tantangan yang yang dihadapi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan PD adalah kesenjangan antara kinerja PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai PD di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan PD tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi PD. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi PD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disingkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaan tugas Dinas Perbungan Kabupaten Sumbawaserta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Kualitas Infrastruktur belum sepenuhnya dalam kondisi	1	Konektifitas antar wilayah masih memerlukan upaya	1	Belum optimalnya manajemen transportasi
				2	Sarana prasarana transportasi darat dan laut masih kurang

	baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur terutama untuk mendukung Layanan Dasar dan Peningkatan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumbawa		penyediaan dan pengembangan terhadap infrastruktur	3	Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata, simpul perekonomian dan simpul pendidikan belum terbangun.
				4	Frekuensi penerbangan dari dan ke Sumbawa masih rendah.
				5	Belum tersusunnya Rencana Induk jaringan lalulintas dan Angkutan Jalan.

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

TABEL T-B.35a
Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Urusan sesuai Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah	Akar Masalah	
1	Ketersediaan Sarpras LLAJ dan Penyelenggaraan LLAJ yang memenuhi standar belum optimal	1	Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana Jalan Kewenangan Kabupaten
		2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C belum optimal
		3	Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir belum optimal
2	Manajemen penyelenggaraan LLAJ belum optimal	1	Pengujian berkala kendaraan bermotor
		2	Audit dan Inspeksi Keselamatan

			LLAJ di jalan
		3	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten/kota
		4	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten
3	Pengembangan dan Keselamatan Penyelenggaraan LLAJ belum optimal	1	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota
4	Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sarpras Pelayaran belum optimal	1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
5	Penyediaan Manajemen Pengelolaan Pelayaran belum optimal	1	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota
6	Penyediaan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran belum optimal	1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Akar masalah pada Tabel T.B-35a pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa terkait dengan kualitas Sarana dan Prasarana. Masalah dan akar masalah pada tabel di atas akan berkaitan dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang akan disajikan dalam Tabel T.C-26 pada bagian berikutnya dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya

Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban". "Sumbawa gemilang" bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan "berkeadaban" yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.

SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, Industri dan pariwisata.

SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketentuan umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahananan terhadap bencana perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa dalam melaksanakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Sumbawa sesuai kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mewujudkan visi dengan melaksanakan Misi V (kelima) :

"SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN, Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahananan terhadap bencana perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan".

Dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan OPD Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI Tahun 2020-2024

Berdasarkan Sasaran strategis pembangunan Kementrian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahuan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya Konektivitas Nasional
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
- Meningkatnya Keselamatan Transportasi
- Meningkatnya Kualitats SDM Transportasi yang Kompeten
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum
- Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
- Meingkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Meningkatnya Transportasi Berkelanjutan.

b. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi
- Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Penyajian dan penelahaan terhadap sasaran dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan dan sasaran dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam bentuk matrik sehingga mudah diidentifikasikan poin-poin yang dapat menjadi faktor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

No	Sasaran		Faktor	
	Kementrian Perhubungan 2020-2024	**Dinas Perhubungan Provinsi NTB 2020-2024**	**+**	**-**
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi	√	
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi		√	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	√	
4	Meningkatnya Kualitats SDM Transportasi yang Kompeten		√	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum		√	
6	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian		√	
7	Meingkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		√	
8	Meningkatnya Transportasi Berkelanjutan.		√	

Kesimpulan:

Memperhatikan sasaran-sasaran K/L di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang telah ditentukan di atas menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. RTRW berkedudukan sebagai pedoman antara lain bagi penyusunan rencana pembangunan, yaitu memberi pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar-daerah, dan antar pemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang

untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keber-lanjutan penghidupan *(livelihood sustainability)* sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Terkait dengan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, guna mengantisifasi dampak negatif dari penyelenggaraan transportasi berupa perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan, setiap angkutan umum yang melaksanakan uji KIR dilakukan serangkaian test uji emisi yang ditujukan untuk menentukan tingkat wajar gas buang suatu kendaraan, demikian halnya dengan pembangunan sarana/prasarana beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan yaitu dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isus trategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

3.5.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

Isu pembangunan bidang perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dipandang penting menjadi perhatian untuk menjamin keberlangsungan penyelengaraan transportasi secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas; rekomendasi dan perijinan bidang transportasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengikuti standar pelayanan yang ada antara lain untuk pelayanan uji KIR angkutan umum, ijin trayek, ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (taksi dan angkutan kawasan tertentu), perizinan dan rekomendasi perizinan perhubungan laut. Demikian halnya dengan ketersediaan data, disamping ketersediannya penting untuk diperhatikan validitasnya seperti data arus penumpang (multi-moda) dan data arus barang (multi-moda), serta data terkait lainnya. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dititikberatkan pada penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan selamat yang melibatkan kesiapan SDM dan stakeholder dibidang transportasi, untuk itu pembinaan SDM dan stakeholder merupakan salah satu isu yang penting diperhatikan.
b. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan hingga Tahun 2020 dirasakan belum cukup memadai sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pengembangannya. Infrastruktur bidang perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan : alat pengujian Kendaraaan bermotor, terminal Tipe C , shelter, posjaga/pos-pantau, portal/palang lintasan, dermaga/tambatan perahu. Fasilitas keselamatan transportasi atau perlengkapan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), cermin tikungan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017mendefinisikan tujuan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan public melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan/pelaksanaan tugas/Fungsi/kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi**		**Persentase Peningkatan Nilai RB**	**28,70%**	**28,80%**	**28,90%**	**29,10%**	**29,30%**
		Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	BB	BB	BB	BB	A
			Peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik	**81%**	**83%**	**85%**	**87%**	**89%**
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Peningkatan Rasio Konektivitas kabupaten	85,15	85,4	85,65	85,9	86,15

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi kelima dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Visi :	**Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban**		
Misi 3 :	**Sumbawa Bersih dan Melayani**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1 Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1 Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan PD 3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD 4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian PD 5 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum PD 6 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan

			dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada PD 7 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD 8 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
Misi 5	**: Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mengoptimalisasikan Peningkatan kualitas Infrastrutur	1 Meningkatnya kualitas infrastrutur Perhubungan	1 Penyediaan Sarpras LLAJ dan Penyelenggaraan LLAJ sesuai standar teknis	1 Menyediakan sarpras jalan kewenangan kabupaten yang sesuai standar teknis 2 Mengoptimalkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3 Mengoptimalkan Fasilitasi Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
		2 optimalisasi Manajemen penyelenggaraan LLAJ	1 Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor 2 Mengoptimalkan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan 3 Menyediakan Rancangan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam kabupaten Sumbawa 4 Memfasilitasi Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten
		3 optimalisasi Pengembangan dan Keselamatan Penyelenggaraan LLAJ	1 Menyediakan rancangan dokumen Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam daerah
		4 Optimalisasi Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sarpras Pelayaran	1 Melaksanakan Pembangunan, Fasilitasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
		5 Optimalisasi Penyediaan Manajemen Pengelolaan Pelayaran	1 Memfasilitasi Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah
		6 Optimalisasi Penyediaan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran	1 Menyediakan rancangan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

a. Program administrasi umum/program penunjang urusan pemerintahan daerah
b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
c. Program Pengelolaan Pelayaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umunya dan Dinas Perhubungan pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi kelima yaitu sumabawa tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dianas Perhubungan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Peningkatan Nilai SAKIP PD			**1**	**Persentase Peningkatan Nilai RB**	**28,00%**	**28,70%**	**8.866.068.336**	**28,80%**	**8.128.830.253**	**28,90%**	**8.650.271.765**	**29,10%**	**9.082.785.354**	**29,30%**	**9.536.924.621**	**29,30%**	**9.536.924.621**	**Kepala Dinas Perhubungan**	
	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD		**1.1**	**Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD**	**B**	**BB**	**4.921.559.641**	**BB**	**5.167.637.623**	**BB**	**5.541.019.504**	**BB**	**5.818.070.479**	**BB**	**6.108.974.003**	**BB**	**6.108.974.003**	**Sekretaris**	
		(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**1.1.1**	**Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan**	**70**	**70,12**	**4.921.559.641**	**72**	**5.167.637.623**	**74**	**5.541.019.504**	**76**	**5.818.070.479**	**78**	**6.108.974.003**	**78**	**6.108.974.003**	**Sekretaris**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.1.1.1**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**7 dok**	**7 dok**	**66.257.592**	**7 dok**	**69.570.472**	**7 dok**	**73.048.995**	**7 dok**	**76.701.445**	**7 dok**	**80.536.517**	**7 dok**	**80.536.517**	**Sekretaris**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 DOK	1 DOK	21.771.700	1 DOK	22.860.285	1 DOK	24.003.299	1 DOK	25.203.464	1 DOK	26.463.637	1 DOK	**26.463.637**	**Sekretaris**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.1.1.1.2	Jumlah RKA-SKPD yang disusun	1 DOK	1 DOK	1.892.800	1 DOK	1.987.440	1 DOK	2.086.812	1 DOK	2.191.153	1 DOK	2.300.710	1 DOK	**2.300.710**	**Sekretaris**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.1.1.1.3	Jumlah RKAP/DPPA yang disusun	1 DOK	1 DOK	826.000	1 DOK	867.300	1 DOK	910.665	1 DOK	956.198	1 DOK	1.004.008	1 DOK	**1.004.008**	**Sekretaris**	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.1.1.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 DOK	1 DOK	29.468.300	1 DOK	30.941.715	1 DOK	32.488.801	1 DOK	34.113.241	1 DOK	35.818.903	1 DOK	**35.818.903**	**Sekretaris**	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.1.1.1.5	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	1 DOK	1 DOK	650.997	1 DOK	683.547	1 DOK	717.724	1 DOK	753.610	1 DOK	791.291	1 DOK	**791.291**	**Sekretaris**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1.1.1.1.6	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 dok	2 dok	3.765.895	2 dok	3.954.190	2 dok	4.151.899	2 dok	4.359.494	2 dok	4.577.469	2 dok	**4.577.469**	**Sekretaris**	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.1.7	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	1 dok	7.881.900	1 dok	8.275.995	1 dok	8.689.795	1 dok	9.124.284	1 dok	9.580.499	1 dok	**9.580.499**	**Sekretaris**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.2	**Jumlah indikator pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditargetkan**	**4 dok**	**6 dok**	**4.212.903.023**	**6 dok**	**4.423.548.174**	**6 dok**	**4.644.725.583**	**6 dok**	**4.876.961.862**	**6 dok**	**5.120.809.955**	**6 dok**	**5.120.809.955**	**Sekretaris**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.1.2.1	Jumlah ASN laki-laki dan perempuan yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	42 orang	43 orang	4.092.494.433	43 orang	4.297.119.155	43 orang	4.511.975.112	43 orang	4.737.573.868	43 orang	4.974.452.561	43 orang	4.974.452.561	Sekretaris	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.1.1.2.2	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	3 dok	3 dok	107.958.200	3 dok	113.356.110	3 dok	119.023.916	3 dok	124.975.111	3 dok	131.223.867	3 dok	131.223.867	Sekretaris	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.1.1.2.3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1 dok	715.800	1 dok	751.590	1 dok	789.170	1 dok	828.628	1 dok	870.059	1 dok	870.059	Sekretaris	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.1.1.2.4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	-	1 dok	4.593.000	1 dok	4.822.650	1 dok	5.063.783	1 dok	5.316.972	1 dok	5.582.820	1 dok	5.582.820	Sekretaris	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1.1.1.2.5	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	-	3 dok	3.937.390	3 dok	4.134.260	3 dok	4.340.972	3 dok	4.558.021	3 dok	4.785.922	3 dok	4.785.922	Sekretaris	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.1.1.2.6	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	-	1 dok	3.204.200	1 dok	3.364.410	1 dok	3.532.631	1 dok	3.709.262	1 dok	3.894.725	1 dok	3.894.725	Sekretaris	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.1.3	**Jumlah indikator keluaran administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan**	**3 dok**	**4 dok**	**123.027.178**	**4 dok**	**129.178.537**	**4 dok**	**165.637.464**	**4 dok**	**173.919.337**	**4 dok**	**182.615.304**	**4 dok**	182.615.304	Sekretaris	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1.1.3.1	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	4 dok	4 dok	1.647.200	4 dok	1.729.560	4 dok	1.816.038	4 dok	1.906.840	4 dok	2.002.182	4 dok	2.002.182	Sekretaris	
		Penyediaan Peralatan dan PereIngkapan Kantor	1.1.1.3.2	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 jenis	2 jenis	25.524.000	2 unit	26.800.200	2 unit	28.140.210	2 unit	29.547.221	2 unit	31.024.582	2 unit	31.024.582	Sekretaris	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Penyediaan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1.1.1.3.3	Jumlah media cetak berlangganan	2 harian	2 harian	2.560.400	2 harian surat kabar dan 6 kali iklan	2.688.420	2 harian surat kabar dan 6 kali iklan	2.822.841	2 harian surat kabar dan 6 kali iklan	2.963.983	2 harian surat kabar dan 6 kali iklan	3.112.182	2 harian surat kabar dan 6 kali iklan	3.112.182	Sekretaris	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1.1.3.4	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	24 dok	24 dok	93.295.578	24 dok	97.960.357	24 dok	102.858.375	24 dok	108.001.293	24 dok	113.401.358	24 dok	113.401.358	Sekretaris	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.1.1.3.5	Jumlah Pengelola dan Penata Arsip Dinamis pada SKPD yang difasilitasi	-	-	-	-	-	10.000 dokumen	30.000.000	10.000 dokumen	31.500.000	10.000 dokumen	33.075.000	10.000 dokumen	33.075.000	Sekretaris	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.4	**Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 dok**	**4 dok**	**141.665.998**	**4 dok**	**148.749.298**	**4 dok**	**156.186.763**	**4 dok**	**163.996.101**	**4 dok**	**172.195.906**	**4 dok**	**172.195.906**	**Sekretaris**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.1.1.4.1	Jumlah Surat (masuk/keluar)	1000 surat	1000 surat	50.623.048	1000 surat	53.154.200	1000 surat	55.811.910	1000 surat	58.602.506	1000 surat	61.532.631	1000 surat	**61.532.631**	**Sekretaris**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1.1.4.2	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 dok	4 dok	51.984.900	4 dok	54.584.145	4 dok	57.313.352	4 dok	60.179.020	4 dok	63.187.971	4 dok	**63.187.971**	**Sekretaris**	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1.1.4.3	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	12 bulan	12 bulan	2.538.050	12 bulan	2.664.953	12 bulan	2.798.200	12 bulan	2.938.110	12 bulan	3.085.016	12 bulan	**3.085.016**	**Sekretaris**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.1.4.4	Jumlah jenis komponen peralatan listrik yang diadakan	3 jenis	3 jenis	36.520.000	3 jenis	38.346.000	3 jenis	40.263.300	3 jenis	42.276.465	3 jenis	44.390.288	3 jenis	**44.390.288**	**Sekretaris**	
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.1.1.5**	**Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**1 dok**	**4 dok**	**377.705.850**	**4 dok**	**396.591.143**	**4 dok**	**416.420.700**	**4 dok**	**437.241.735**	**4 dok**	**459.103.821**	**4 dok**	**459.103.821**	**Sekretaris**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1.1.5.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	5 unit	5 unit	9.300.000	5 unit	9.765.000	5 unit	10.253.250	5 unit	10.765.913	5 unit	11.304.208	5 unit	**11.304.208**	**Sekretaris**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1.1.5.2	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	-	1 paket	110.000.000	1 paket	115.500.000	1 paket	121.275.000	1 paket	127.338.750	1 paket	133.705.688	1 paket	**133.705.688**	**Sekretaris**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1.1.5.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	-	1 paket	178.290.000	1 paket	187.204.500	1 paket	196.564.725	1 paket	206.392.961	1 paket	216.712.609	1 paket	**216.712.609**	**Sekretaris**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.1.1.5.4	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	1 paket	80.115.850	1 paket	84.121.643	1 paket	88.327.725	1 paket	92.744.111	1 paket	97.381.316	1 paket	**97.381.316**	**Sekretaris**	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.1.1.6**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**-**	**dok**	**-**	**dok**	**-**	**3 dok**	**85.000.000**	**3 dok**	**89.250.000**	**3 dok**	**93.712.500**	**3 dok**	**93.712.500**	**sekretaris**	
		Pengadaan Mebel	**1.1.1.6.2**	Jumlah Mebel yang diadakan	-	unit	-	unit	-	unit	25.000.000	unit	26.250.000	unit	27.562.500	unit	**27.562.500**	**sekretaris**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**1.1.1.6.3**	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	-	unit	-	unit	-	unit	25.000.000	unit	26.250.000	unit	27.562.500	unit	**27.562.500**	**sekretaris**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**1.1.1.6.4**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	paket	-	paket	-	paket	35.000.000	paket	36.750.000	paket	38.587.500	paket	**38.587.500**	**sekretaris**	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan		**1.2**	**Peningkatan Rasio Konektivitas kabupaten**	**85,6**	**85,15**	**3.944.508.695**	**85,4**	**2.961.192.630**	**85,65**	**3.109.252.261**	**85,9**	**3.264.714.874**	**85,15**	**3.427.950.618**	**85,15**	**3.427.950.618**	**Kabid Prasarana dan Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan, Kabid Prasarana, Kabid Pengembangan dan Keselamatan**	
		(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**1.2.1.1**	**Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	**100%**	**100%**	**534.011.645**	**100%**	**560.712.227**	**100%**	**588.747.839**	**100%**	**618.185.231**	**100%**	**649.094.492**	**100%**	**649.094.492**	**Kabid Prasarana dan Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	**1.2.1.1.1**	**Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan dan direhab/pelihara**	**2 dok**	**2 dok**	**265.012.295**	**2 dok**	**278.262.910**	**2 dok**	**292.176.055**	**2 dok**	**306.784.858**	**2 dok**	**322.124.101**	**2 dok**	**322.124.101**	**Kabid Prasarana**	
		Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	**1.2.1.1.1.1**	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan	6 paket	5 paket	127.326.230	5 paket	133.692.542	5 paket	140.377.169	5 paket	147.396.027	5 paket	154.765.828	5 paket	**154.765.828**	**Kabid Prasarana**	
				Pengadaan dan pemasangan Rambu lalu lintas	216 buah	21 buah		266 buah		316 buah		366 buah		431 buah					
				Pemasangan Marka Jalan	31.235 m2	45.235 m2		73.780 m2		111.840 m2		140.385 m2		180.348 m2					
				Pengadaan dan pemasangan Warning Light	9 unit	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit					
				Pembangunan Portal	4 lokasi														
				Pembangunan Halte	12 lokasi	2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi					
				Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardraill)	551 m	40 m		50 m		50 m		50 m		50 m					
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan jalan	**1.2.1.1.1.2**	Jumlah perlengkapan jalan yang direhab dan dipelihara	1 Paket	1 Paket	137.686.065	1 Paket	144.570.368	1 Paket	151.798.887	1 Paket	159.388.831	1 Paket	167.358.273	1 Paket	**167.358.273**	**Kabid Prasarana**	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**1.2.1.1.2**	**Jumlah terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang dikelola**	**1 unit**	**1 unit**	**17.211.450**	**1 unit**	**18.072.023**	**1 unit**	**18.975.624**	**1 unit**	**19.924.405**	**1 unit**	**20.920.625**	**1 unit**	**20.920.625**	**Kabid Prasarana**	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal (Fasiltas Utama dan Pendukung)	**1.2.1.1.2.1**	Jumlah fasilitas uatama dan pendukung terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang direhab dan dipelihara	1000 orang	1000 orang	17.211.450	1000 orang	18.072.023	1000 orang	18.975.624	1000 orang	19.924.405	1000 orang	20.920.625	1000 orang	**20.920.625**	**Kabid Prasarana**	
		Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	**1.2.1.1.3**	**Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan**	**1 dok**	**1 dok**	**251.787.900**	**1 dok**	**264.377.295**	**1 dok**	**277.596.160**	**1 dok**	**291.475.968**	**1 dok**	**306.049.766**	**1 dok**	**306.049.766**	**Kabid Prasarana**	
		Koordinasi dan sinkronissai Pengawasan pelaksanaan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fsilitas parkir keweanangan Kabupaten / kota	**1.2.1.1.3.1**	Jumlah dokumen perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang disusun	1 dok	1 dok	251.787.900	1 dok	264.377.295	1 dok	277.596.160	1 dok	291.475.968	1 dok	306.049.766	1 dok	**306.049.766**	**Kabid Prasarana**	
		(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**1.2.1.2**	**Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu Lintas jalan dan Angkutan**	**100%**	**100%**	**1.172.997.250**	**100%**	**1.231.647.113**	**100%**	**1.293.229.468**	**100%**	**1.357.890.942**	**100%**	**1.425.785.489**	100%	**1.425.785.489**		
		Pengujian berkala kendaraan bermotor	**1.2.1.2.1**	**Jumlah kendaraan bermotor wajib uji berkala yang diuji**	5464 unit	5464 unit	**442.489.000**	5464 unit	**464.613.450**	5464 unit	**487.844.123**	5464 unit	**512.236.329**	5464 unit	**537.848.145**	**5464 unit**	**537.848.145**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	**1.2.1.2.1.1**	Jumlah Sarpras PKB yang diadakan dan dipelihara	-	2 paket	392.107.000	2 paket	411.712.350	2 paket	432.297.968	2 paket	453.912.866	2 paket	476.608.509	2 paket	**476.608.509**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	**1.2.1.2.1.2**	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang diregistrasi	5464 unit	5464 unit	50.382.000	5464 unit	52.901.100	5464 unit	55.546.155	5464 unit	58.323.463	5464 unit	61.239.636	5464 unit	**61.239.636**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	**1.2.1.2.2**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**532.135.450**	**1 Laporan**	**558.742.223**	**1 Laporan**	**586.679.334**	**1 Laporan**	**616.013.300**	**1 Laporan**	**646.813.965**	**1 Laporan**	**646.813.965**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor dalam kabupaten/ kota	**1.2.1.2.2.1**	Jumlah inspeksi dan audit keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	20 kali	20 kali	532.135.450	20 kali	558.742.223	20 kali	586.679.334	20 kali	616.013.300	20 kali	646.813.965	20 kali	**646.813.965**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten/kota	**1.2.1.2.3**	**Jumlah dokumen penetapan jaringan trayek yang disusun**	**-**	**1 dok**	**145.935.000**	**1 dok**	**153.231.750**	**1 dok**	**160.893.338**	**1 dok**	**168.938.004**	**1 dok**	**177.384.905**	**1 dok**	**177.384.905**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		perumusan kebijakan Rencana Umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	**1.2.1.2.3.1**	Jumlah dokumen Rencana Umum jaringan trayek pedesaan yang disusun	-	1 dok	145.935.000	1 dok	153.231.750	1 dok	160.893.338	1 dok	168.938.004	1 dok	177.384.905	1 dok	**177.384.905**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten	**1.2.1.2.4**	**Jumlah dokumentasi penerbitan rekomendasi ijin trayek yang disusun**	**1 dok**	**2 dok**	**52.437.800**	**2 dok**	**55.059.690**	**2 dok**	**57.812.675**	**2 dok**	**60.703.308**	**2 dok**	**63.738.474**	**2 dok**	**63.738.474**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	**1.2.1.2.4.1**	Jumlah pemohon rekomendasi ijin trayek yang dilayani	342 orang	342 orang	49.389.000	342 orang	51.858.450	342 orang	54.451.373	342 orang	57.173.941	342 orang	60.032.638	342 orang	**60.032.638**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelengggaran angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	**1.2.1.2.4.2**	Jumlah dokumen pengawasan pelaksanaan izin penyelengggaran angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	-	2 dok	3.048.800	2 dok	3.201.240	2 dok	3.361.302	2 dok	3.529.367	2 dok	3.705.835	2 dok	**3.705.835**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**1.2.1.3**	**Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan Lalu Lintas jalan dan Angkutan**	**-**	**100%**	**4.269.800**	**100%**	**4.483.290**	**100%**	**4.707.455**	**100%**	**4.942.827**	**100%**	**5.189.969**	**100%**	**5.189.969**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	**1.2.1.3.1**	**Jumlah Dokumen penetapan Tarif kelas ekonomi yang disusun**	**-**	**1 dok**	**4.269.800**	**1 dok**	**4.483.290**	**1 dok**	**4.707.455**	**1 dok**	**4.942.827**	**1 dok**	**5.189.969**	**1 dok**	**5.189.969**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	
		Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**1.2.1.3.1.1**	Jumlah dokumen kajian teknins perhitungan rencana tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang disusun	-	1 dok	4.269.800	1 dok	4.483.290	1 dok	4.707.455	1 dok	4.942.827	1 dok	5.189.969	1 dok	**5.189.969**	**Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan**	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		(3) PENGELOLAAN PELAYARAN	**1.2.3.1**	**Persentase capaian Kinerja Pengelolaan prasarana pelayaran**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**1.000.000.000**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**1.102.500.000**	**100%**	**1.157.625.000**	**100%**	**1.157.625.000**	**Kabid Pengembangan dan Keselamatan/ Kabid Prasarana**	
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**1.2.3.1.1**	**Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang layak dioperasikan**	**-**	**-**	**-**	**1 dok**	**1.000.000.000**	**1 dok**	**1.050.000.000**	**1 dok**	**1.102.500.000**	**1 dok**	**1.157.625.000**	**1 dok**	**1.157.625.000**	**Kabid Pengembangan dan Keselamatan**	
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	**1.2.3.1.1.1**	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal ynag dibangun dan dipelihara	-	-	-	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.050.000.000	1 unit	1.102.500.000	1 unit	1.157.625.000	1 unit	**1.157.625.000**	**Kabid Pengembangan dan Keselamatan**	
		(3) PENGELOLAAN PELAYARAN	**1.2.3.2**	**Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan angkutan pelayaran**	**-**	**-**	**2.233.230.000**	**100%**	**7.350.000**	**1**	**7.717.500**	**1**	**8.103.375**	**1**	**8.508.544**	**1**	**8.508.544**		
		Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota	**1.2.3.2.1**	**Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut yang disusun**	**-**	**-**	**2.233.230.000**	**1 dok**	**7.350.000**	**1 dok**	**7.717.500**	**1 dok**	**8.103.375**	**1 dok**	**8.508.544**	**1 dok**	**8.508.544**	**Kabid Prasarana**	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	**1.2.3.2.1.1**	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengwasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan daerah yang disusun	-	-	2.233.230.000	1 dok	7.350.000	1 dok	7.717.500	1 dok	8.103.375	1 dok	8.508.544	1 dok	**8.508.544**	**Kabid Prasarana**	
		(3) PENGELOLAAN PELAYARAN	**1.2.3.3**	**Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan pelayaran**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**157.000.000**	**100%**	**164.850.000**	**100%**	**173.092.500**	**100%**	**181.747.125**	**100%**	**181.747.125**		
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.2.3.3.1**	**Jumlah dokumen penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal yang disusun**	**-**	**-**	**-**	**2 dok**	**157.000.000**	**2 dok**	**164.850.000**	**2 dok**	**173.092.500**	**2 dok**	**181.747.125**	**2 dok**	**181.747.125**	**Kabid Pengembangan dan Keselamatan**	
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	**1.2.3.3.1.1**	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan dan dipelihara	-	-	-	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	1 unit	**173.643.750**	**Kabid Pengembangan dan Keselamatan**	
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.2.3.3.1.2**	Jumlah dokumen hasil kajian teknis Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal yang disusun	-	-	-	1 dok	7.000.000	1 dok	7.350.000	1 dok	7.717.500	1 dok	8.103.375	1 dok	**8.103.375**	**Kabid Pengembangan dan Keselamatan**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diketahui bahwa capaian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebuah kinerja dalam bentuk suatu keluaran/hasil/dampak yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (*input*). Untuk itu diperlukan suatu Indikator Kinerja yang akan berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan melalui suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sub keluaran (*sub output*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada lima tahun mendatang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Sumbawa
(Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026)

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	**Persentase Peningkatan Nilai RB**	**28,00%**	**28,70%**	**28,80%**	**28,90%**	**29,10%**	**29,30%**	**29,30%**
1.1	**Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**A**
1.1.1	Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	**70**	**70,12**	**72**	**74**	**76**	**80,01**	**80,01**
1.2	**Peningkatan Rasio Konektivitas kabupaten**	**84,9**	**84,9**	**84,9**	**84,9**	**84,9**	**84,9**	**84,9**
1.2.1	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.2	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu Lintas jalan dan Angkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.3	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan Lalu Lintas jalan dan Angkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.1	Persentase capaian Kinerja Pengelolaan prasarana pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.2	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan angkutan pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.3	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Bahwa implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan/sub kegiatan yang dirumuskan, diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;
b. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan, dan diharapkan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH